



K S H M



**BADAN POM**

# 2022

# LAPORAN TAHUNAN

**BIRO KERJA SAMA DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

 @birokerjasamahumas.bpom

 kerjasamahumas@pom.go.id

 kshumasbpom

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk publikasi kinerja yang memuat hasil kegiatan dan capaian kinerja Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di skala nasional dan internasional yang bersifat teknis dan administratif.

Kami berharap dengan adanya publikasi ini, dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program kegiatan demi peningkatan kontribusi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam program pengawasan obat BPOM di masa mendatang, khususnya terkait kerja sama dan hubungan masyarakat.

Selama tahun 2022, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang diatur dalam Peraturan kepala BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga secara konsisten melakukan perbaikan terus-menerus di berbagai bidang, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju good governance dan clean government.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan kegiatan tahunan yang akan datang agar lebih baik dan bermanfaat.

Terakhir, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, terutama bagi pejabat dan staf di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Jakarta, 17 Maret 2023  
Kepala Biro Kerja Sama dan  
Hubungan Masyarakat,



Noorman Effendi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Instansi .....	1
A.1. Visi dan Misi.....	1
A.2. Tujuan.....	1
A.3. Tugas dan Fungsi .....	1
A.4. Budaya Organisasi.....	2
A.5. Struktur Organisasi .....	4
B. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator.....	5
<b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b> .....	<b>8</b>
A. Sumber Daya Manusia.....	8
A.1. Data Kepegawaian.....	8
A.2. Kebutuhan Pelanggan .....	10
A.3. Peningkatan Kompetensi SDM .....	10
B. Sarana dan Prasarana .....	10
C. Anggaran .....	11
<b>BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b> .....	<b>13</b>
A. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global.....	13
A.1. IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.....	13
A.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	16
B. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas .....	21
B.1. IKK 3: Indeks kepuasan media .....	22
B.2. IKK 4: Indeks Opini Publik.....	24
B.3. IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas .....	26
C. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM .....	27

D. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional .....	31
E. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas .....	33
E.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media .....	33
E.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti .....	35
E.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting .....	37
F. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal.....	38
G. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal.....	41
H. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas.....	46
I. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Core Value BERAKHLAK.....	3
Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR .....	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	5
Gambar 4. Gambar Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	6
Gambar 5. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	6
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja.....	9
Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana .....	11
Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2022.....	11
Tabel 6. Capaian Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri 2022 .....	23



# HIGHLIGHT KEGIATAN

## **FEBRUARI**

### **EXPO 2020 DUBAI UNI EMIRAT ARAB**

Partisipasi BPOM pada Expo 2020 Dubai pada tanggal 25 Februari – 3 Maret 2022, bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah RI dalam rangka memperluas ekspor produk Indonesia ke pasar global dan meningkatkan akses informasi produk Obat dan Makanan Indonesia di negara mitra tujuan ekspor.



Partisipasi dalam Expo 2020 Dubai ini akan menjadi refleksi komitmen BPOM untuk meningkatkan daya saing produk obat dan makanan Indonesia serta menarik investasi. Selain itu, BPOM secara proaktif mengomunikasikan “**Healthy Life for a Better Future**” kepada masyarakat nasional maupun internasional dengan mengonsumsi obat dan makanan dari Indonesia yang khasiat, kualitas dan keamanannya telah terjamin oleh BPOM. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang terdiri dari Pameran Produk dan Konten Digital di *Rolling Exhibition*, *Business Forum* dan *Business Matching* Obat dan Makanan, dan Seminar “*Indonesian Government Policy to Support Investment in Food and Drug Sector Industry*”.

Pada area *Rolling Exhibition*, BPOM menampilkan 218 produk Obat dan Makanan dari 42 perusahaan. Pada kesempatan tersebut, juga ditampilkan video profile BPOM serta video promosi dari perusahaan Obat dan Makanan. Para pengunjung *Rolling Exhibition* antusias untuk memperoleh informasi terkait produk Indonesia, seperti kopi, bumbu masakan, obat tradisional, termasuk ketersediaan produk tersebut di pasar Timur Tengah.

Seminar mengenai “*Indonesian Government Policy to Support Investment in Food and Drug Sector Industry*” yang diselenggarakan secara *hybrid* bertujuan untuk memberikan informasi terkait fasilitasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait investasi di bidang Obat dan Makanan serta dan mempromosikan iklim investasi di Indonesia yang merupakan salah satu upaya untuk menarik investasi asing ke Indonesia.

Penyelenggaraan *Business Forum* mengundang regulator mitra dari regulator pangan dari *Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)* Republik Turki, regulator obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dari PCIM-H India, TGA Australia dan NMPA RRT.



Selain, pertukaran informasi terkait perizinan pemasukan produk antar regulator, BPOM juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertanya langsung kepada regulator mengenai kebijakan, regulasi, standardisasi, dan hambatan yang akan dihadapi ketika akan melakukan ekspor produk obat dan makanan ke negara Turki,

Australia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Penyelenggaraan *Business Matching* secara *hybrid* telah membuka peluang untuk menjalin kerja sama antara pelaku usaha Obat dan Makanan Indonesia dengan *potential buyer* di Uni Emirat Arab dan negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC) Countries* yang telah berkomunikasi pada kegiatan tersebut. Pada pertemuan, terdapat beberapa *prospect business deal* yang akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Obat dan Makanan.



## **MARET**

### **PENGUATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PERBATASAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



Perkuat garda terdepan di perbatasan, BPOM melakukan peninjauan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pengawasan obat dan makanan terpadu. Momentum kerja sama juga diiringi dengan peresmian secara langsung Balai POM di Tarakan yang sebelumnya termasuk dalam klasifikasi Loka POM pada

Kamis (24/03/2022). Peningkatan klasifikasi Balai POM di Tarakan merupakan wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang memerlukan peningkatan kinerja pengawasan adalah wilayah geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia di sebelah utara dan barat, dan rentan terhadap pemasukan produk ilegal.

Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) BPOM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengawasan obat dan makanan terpadu ini disaksikan juga oleh anggota komisi IX DPR RI, Hasan Saleh.

Kepala BPOM berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan



yang berdampak nyata pada peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan di Kaltara. Ruang lingkup kerja sama BPOM dengan Pemerintah Provinsi Kaltara disusun secara komprehensif meliputi pengawasan, pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi masyarakat.

## **MEDIA SOSIAL BPOM RAIH BRONZE WINNER PADA AJANG PR INDONESIA AWARDS 2022**



Media Sosial BPOM mendapatkan penghargaan berupa *Bronze Winner* dari ajang PR Indonesia Awards (PRIA 2022) yang diserahkan secara langsung pada malam penganugerahan PRIA 2022, Jumat (25/03/2022). PRIA merupakan ajang yang diselenggarakan oleh PR Indonesia dalam

mengapresiasi kinerja hubungan masyarakat (Humas)/public relations (PR) yang unggul dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta/multinasional di seluruh Indonesia. PRIA mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi yang digelar setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, terdapat 194 institusi atau perusahaan dengan total 782 entri ikut berkompetisi pada pagelaran ini. Sebanyak sepuluh kategori dipertandingkan antara lain kategori *owned media*, kanal digital, program PR, program CSR, penanganan krisis, manual (pedoman) tata kelola kehumasan, departemen PR, laporan tahunan, *brand visual identity*, hingga terpopuler di media cetak. BPOM baru pertama kali mengikuti ajang kompetisi ini dan berhasil memperoleh penghargaan pada kategori Kanal Digital, subkategori Media Sosial.

## **FOLLOW UP (FU) VISIT WHO NRA BENCHMARKING**



Pada tanggal 28 – 29 Maret 2022 telah dilaksanakan *Follow Up (FU) Visit WHO NRA Benchmarking* yang dihadiri oleh tim WHO-HQ (Dr. Alireza Khadem Broojerdi, Dr. Mohamed Refaat); WHO SEARO (Dr. Adrien Inoubli); WHO Indonesia (Dr. Farrukh Qureshi, Sunnar Leo) serta Deputi 1, Deputi 3 (daring),

Inspektur Utama (daring), Direktur di lingkungan Kedeputian 1, Kepala P3OMN/Plt. Deputi 4, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat serta perwakilan dari masing-masing fungsi regulatori (unit kerja di Kedeputian 1, Kedeputian 4, P3OMN, dan Kesestamaan).

Dalam sambutannya, WHO menyampaikan tujuan dan *outcome follow up visit*. Selain itu disampaikan juga *update* terkait skema WLA (WHO Listed Authorities) yang secara resmi sudah di mulai pada awal April 2022. Deputi 1 menyampaikan paparan mengenai *update* dan perubahan yang terjadi pada tiap fungsi regulatori. Selain itu, dilaksanakan pemaparan *follow up Institutional Development Plan (IDP)* dari masing-masing fungsi regulatori.



Pada kegiatan tersebut, Tim WHO melakukan verifikasi terhadap *update* IDP yang dilakukan oleh masing-masing fungsi, dan pada sesi penutupan, WHO menyampaikan beberapa aspek temuan positif, rekomendasi serta langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh BPOM.

Secara garis besar, hasil dari kegiatan follow up visit tersebut mendapatkan hasil memuaskan (*very exceptional*). WHO menyatakan bahwa Badan POM telah meningkatkan regulasi yang dimilikinya melalui peningkatan perkuatan dasar hukum, perubahan struktur organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan indikator kinerja, serta peningkatan level transparansi dan edukasi informasi kepada masyarakat.

Terlepas dari tekanan yang terjadi selama pandemi COVID-19, BPOM berhasil meningkatkan dan memperbaharui kapasitas regulatori. Hal ini menjadi pertanda baik terhadap peningkatan maturitas sistem regulatori BPOM.

## **TRAINING OF TRAINER (TOT) WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI**



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga menggelar *Training of Trainer (ToT) Workshop Informasi dan Komunikasi* secara *Hybrid* pada 1-4 Maret 2022. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan Tim Humas BPOM dalam mengemas pesan komunikasi serta mengevaluasi pengemasan pesan

komunikasi (foto, konten media sosial, berita aktual dan siaran pers) yang telah diproduksi Humas sebagai bahan penyampaian kinerja Badan POM kepada masyarakat. Kegiatan diikuti oleh 22 peserta dari Tim Humas, Tim Pengaduan Masyarakat, dan Perwakilan Biro Kerja Sama dan Humas dengan pendalaman materi terkait fotografi jurnalistik, menulis berita aktual, membuat konten kreatif, dan pedoman media sosial.

## APRIL

### **PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG PANGAN AMAN GOES TO CAMPUS**



Bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022, telah diluncurkan Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito. PAGC merupakan suatu bentuk inovasi BPOM dalam pemberdayaan komunitas intelektual sebagai fasilitator keamanan pangan. Program ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan BPOM terhadap UMK pangan olahan guna semakin banyaknya produk binaan yang dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan dan memperoleh izin edar BPOM.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPOM dengan 13 perguruan tinggi yang yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Sahid.



Melalui MoU PAGC ini diharapkan dapat terjalin kerja sama antar kedua belah pihak guna menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang kompeten, tangguh dan siap bekerja di bidang keamanan pangan; meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi mahasiswa dalam melakukan pendampingan terhadap UMK Pangan Olahan, serta meningkatkan keamanan pangan dan daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Kepala BPOM berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak nyata pada peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan kampus serta universitas.

**MEI**

## WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI (WIKOM) COACHING PIMPINAN



Untuk mempublikasikan informasi dan kinerja BPOM kepada publik diperlukan peran *stakeholder* yang mampu melakukan amplifikasi informasi secara luas. Salah satu *stakeholder* yang mampu menjalankan peran tersebut dan perlu mendapat perhatian khusus dari pimpinan unit dalam organisasi Badan

POM adalah media dan elemennya (awak media). Hubungan dengan media baik nasional maupun lokal harus tercipta secara harmonis dan baik supaya dapat saling melengkapi peran masing-masing.

Kepercayaan publik yang baik terhadap BPOM dan hubungan yang baik dengan media dapat membentuk opini publik yang baik dan semakin meningkatkan reputasi BPOM. Upaya menjaga reputasi organisasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan unit kerja di BPOM termasuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai ujung tombak Badan POM di daerah.



Untuk itu Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menggelar **Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Coaching Pimpinan di Batam, pada 12 Mei 2022.**

Kegiatan yang diikuti oleh 141 peserta yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pimpinan Unit Kerja, serta perwakilan Bidang Informasi dan Komunikasi di seluruh

UPT BPOM ini adalah upaya meningkatkan wawasan pimpinan unit di BPOM terkait kehumasan terutama pemahaman cara berkomunikasi yang baik kepada publik dan media, sehingga dapat menyelaraskan komunikasi dan pengemasan pesan yang akan disampaikan oleh BPOM kepada publik melalui media yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

## SIMPOSIUM DAN SEMINAR ASEAN – JAPAN RISK MANAGEMENT PLAN (RMP) TAHUN 2022

B POM bersama *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA) Jepang dan Fakultas Farmasi – Universitas Indonesia menyelenggarakan virtual simposium dan seminar tentang *Risk Management Plan* (RMP) pada bidang farmasi, 23 Mei 2022.



Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara PMDA dan *Pharmaceutical Product Working Group* (PPWG), di bawah *the ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality* (ACCSQ), dengan pendanaan dari *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF). Kegiatan ditujukan untuk peningkatan kapasitas regulator menuju harmonisasi peraturan di bidang farmasi.

Kegiatan simposium difokuskan pada pertukaran informasi terkini antar regulator, akademisi, dan industri farmasi terkait RMP. Sementara itu, kegiatan seminar difokuskan untuk berbagi informasi dan pengalaman di antara otoritas regulator Negara Anggota ASEAN, serta diskusi kelompok penyelesaian studi kasus untuk memberikan contoh nyata penerapan RMP bagi para regulator ASEAN.

Simposium pada tanggal 23 Mei 2022 diikuti oleh 283 (dua ratus delapan puluh tiga) peserta yang terdiri dari regulator, industri farmasi, dan akademisi. Sedangkan pada seminar tanggal 24 - 25 Mei 2022, secara khusus diikuti oleh regulator negara ASEAN yang terdiri dari 28 peserta dan 44 *observer*.





Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Mayagustina Andarini menekankan pentingnya pelaksanaan RMP sebagai proses pemastian keamanan suatu obat melalui pendokumentasian sistem manajemen risiko.

“Proses ini diperlukan untuk mengidentifikasi, mengarakterisasi, dan meminimalkan risiko dari suatu obat”, jelas Mayagustina Andarini.

“Melalui penilaian dan pengelolaan risiko yang dilakukan pada setiap siklus produk, mulai dari fase pengembangan obat hingga pasca pemasaran obat, lebih memperkuat fungsi regulasi dalam menjamin keamanan obat, serta melindungi kesehatan masyarakat”, tuturnya lagi.

Dengan adanya simposium dan seminar ini, diharapkan kapasitas regulator ASEAN akan meningkat dan dapat melanjutkan langkah menuju pengembangan standar RMP yang harmonis. Selain itu, melalui forum ini, perwakilan PMDA mengharapkan untuk dapat mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Jepang dan Negara Anggota ASEAN, terutama dalam bidang regulasi produk farmasi.

## JUNI

### **MEETING OF THE HEADS OF NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES (NRAs) SOUTH-EAST ASIA REGULATORY NETWORK (SEARN)**



Meeting of the Heads of National Regulatory Authorities (NRAs), South-East Asia Regulatory Network (SEARN) New Delhi, India, 7-8 June 2022

Indonesia telah menghadiri pertemuan *the Meeting of the Heads of National Regulatory Authorities (NRAs), South-East Asia Regulatory Network (SEARN)* secara *hybrid* pada 7 – 8 Juni 2022 yang diselenggarakan di New Delhi, India. Pertemuan dihadiri oleh negara-negara anggota SEARN antara lain, Bangladesh, India, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, WHO HQ, dan sejumlah WHO *Regional Office*.

Pertemuan dibuka dengan sambutan dari *Regional Director of WHO South-East Asia Regional Office*, Dr Poonam Khetrapal Singh, yang dibacakan oleh *Director of the Health Strengthening Department*, Mr Manoj Jhalani. Dalam pidato pembukaannya, Direktur Regional menyoroti pentingnya SEARN dalam mencapai cakupan kesehatan universal dan menekankan pentingnya meningkatkan pertukaran informasi antar NRA.

Secara khusus, pertemuan membahas terkait kebutuhan dari NRAs masing-masing negara anggota, pembahasan dan adopsi *draft Term of Reference (ToR)* dan *Workplan*, nominasi *Chair* dari masing-masing *Working Group*, *feedback from the Steering Group* dan *Working Groups*, serta pembahasan *Host of next SEARN Meeting in 2023*.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga dimintakan kembali konfirmasi kesediaan untuk menjadi **Host Country** pada pertemuan **SEARN tahun 2023**, mengingat Indonesia (Kementerian Kesehatan) sebelumnya telah menyatakan kesediaan menjadi *Host Country the 4th Annual Meeting of SEARN* Tahun 2020. Namun karena adanya situasi pandemi COVID-19, *the 4th Annual Meeting of SEARN* belum dapat dilaksanakan.

Terkait hal tersebut, pertemuan menyambut baik pernyataan minat dari Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan WHO SEARN berikutnya, yaitu sebagai *Host Country* Pertemuan WHO SEARN tahun 2023 mendatang.

## KUNJUNGAN KERJA KE DUBAI, PERSATUAN EMIRAT ARAB, NAIROBI, KENYA DAN SINGAPURA

Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Kenya merupakan *hub* di kawasannya masing-masing yang merupakan salah satu tujuan ekspor sektor obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang cukup prospektif. Terlebih akses masyarakat Afrika atas obat-obatan yang masih sangat terbatas merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk semakin giat melakukan penetrasi di pasar Afrika, salah satunya ke negara Kenya.

Dalam kaitan ini, BPOM telah melaksanakan pertemuan dengan regulator mitra di negara PEA dan Kenya untuk membahas peninjauan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta menyelenggarakan Business Forum di Nairobi, Kenya. Selain kerja sama bidang obat dan makanan, BPOM juga telah melaksanakan kunjungan ke Singapura guna menjajaki kolaborasi dalam pengembangan kapasitas regulatori obat dan obat tradisional.

Kepala BPOM telah bertemu dengan *Ministry of Climate Change and Environment (MoCCA)*, PEA guna membahas strategi untuk pengembangan kebijakan keamanan pangan yang ramah lingkungan. Selain itu, telah dilaksanakan kunjungan ke Distributor Pangan Indonesia di PEA untuk membahas kendala dan langkah – langkah strategi untuk mendorong industri pangan nasional untuk ekspor ke PEA dan negara Timur Tengah lainnya.



Di Kenya, Kepala BPOM memenuhi undangan regulator obat Kenya yaitu *Pharmacy and Poisons Board (PPB)* Kenya untuk membahas peningkatan kapasitas regulator Kenya dan berbagi ilmu berupa pelatihan di bidang obat, obat tradisional, kosmetik. Sebelumnya, Kepala BPOM telah bertemu dengan Kementerian Kesehatan Kenya untuk membahas pengembangan sistem regulatori obat dan vaksin yang baik di Kenya serta peningkatan akses dan kesediaan obat dan vaksin di Kenya.

Momen tersebut juga dimanfaatkan BPOM untuk berdialog dengan Organisasi Internasional dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UN Habitat dan UNEP. BPOM dan UN Habitat menjajaki berbagai program yang melibatkan *multi stakeholders* terutama di bidang *awareness of healthy food and nutrition* bagi masyarakat urban.



Sedangkan dengan UNEP, BPOM membahas Langkah-langkah strategis terkait isu makanan baik dari segi pengolahan maupun pengemasan dan dampaknya pada lingkungan.

Bersama KBRI Nairobi, BPOM telah menyelenggarakan *Business Forum* yang dihadiri pelaku usaha Indonesia dan Kenya untuk mendorong perdagangan antara kedua negara di bidang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan



Salah satu mitra strategis BPOM adalah DUKE-NUS CoRe Singapura, sebuah *Centre* bagian dari *DUKE-NUS Medical School* yang mengembangkan program peningkatan kapasitas regulator. Kepala BPOM dan Pimpinan DUKE-NUS CoRe sepakat untuk membentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* guna memfasilitasi kerja sama di bidang pengembangan

kapasitas regulatori obat dan obat tradisional

BPOM juga berkesempatan untuk mengeksplorasi perkembangan terbaru dari teknologi produksi dan pengembangan produk biologi Roche Pharmaceutical dan pembahasan mengenai peningkatan kompetensi pegawai BPOM terkait teknologi produksi bioteknologi melalui program magang (*internship*).

Sebagai tindak lanjut berbagai pertemuan dan kegiatan *Business Forum*, BPOM akan mengawal kerja sama industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan Indonesia dan industri di Kenya, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Kenya. BPOM juga akan mendampingi UMKM, industri pangan dan herbal Indonesia dalam melakukan *business matching* dengan pelaku usaha di PEA dan Kenya sebagai bagian upaya dukungan *Indonesia's Spice Up the World* dan peningkatan perdagangan di negara-negara tersebut.



Bersama UN Habitat dan UNEP, BPOM akan memformulasikan rencana aksi sebagai bagian dari implementasi program *Sustainable Food Pathway* yaitu keamanan pangan mendukung produksi dan konsumsi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kerjasama dengan CoRE Duke-NUS dan Roche Singapore/ Roche International akan terus ditingkatkan untuk peningkatan kapasitas SDM di BPOM.

## PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

B POM berkomitmen mendukung percepatan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kepala B POM RI, Penny K Lukito bersama 17 pimpinan kementerian/lembaga dan BUMN hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman untuk mempercepat penyelenggaraan MPP di seluruh Indonesia, Selasa (28/06/2022).



Penandatanganan dilakukan secara digital dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menekankan agar implementasi dari penandatanganan ini harus benar-benar diwujudkan. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP harus segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi. Saat ini, MPP telah dibentuk di 57 wilayah, dan ditambah 2 MPP yang akan diresmikan, atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebarannya pun masih terpusat di Pulau Jawa, yakni 34 daerah (60%) dari 57 MPP.



Merespons hal ini, Kepala B POM akan mengerahkan jajarannya untuk memberikan kemudahan pelayanan publik di MPP seluruh kabupaten/kota. Mengingat komoditas obat dan makanan merupakan kebutuhan esensial masyarakat. "Dengan Nota Kesepahaman ini, B POM berkomitmen untuk hadir di MPP kota/kabupaten", jelasnya.

## AGUSTUS

### **LEARNING VISIT DEPARTMENT OF DRUG ADMINISTRATION (DDA) NEPAL**

B POM telah menyelenggarakan Program *Learning Visit* pejabat *Department of Drug Administration* (DDA) Nepal selama 6 (enam) hari kerja pada tanggal 22 – 29 Agustus 2022, yang difasilitasi oleh *US Agency for International Development (USAID) The Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services* (MTaPS) Indonesia.

Peserta pada Program *Learning Visit* yaitu: Mr. Narayan Prasad Dhakal, Chief Drug Administrator Ministry of Health and Population (MoHP) Nepal dan Mr. Nikesh Shrestha, Pharmacy Officer DDA Nepal. Kegiatan diawali dengan pertemuan antara DDA Nepal, perwakilan M TaPS Indonesia dan B POM yang diwakili oleh Plh. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dan unit-unit terkait.



Dalam kesempatan tersebut, Pihak Nepal menyampaikan tujuan kedatangan adalah dalam rangka mempelajari dan memperoleh sharing informasi dan pengalaman dari B POM terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsi-fungsi regulatori sesuai *WHO GBT assessment*. Hal ini mengingat B POM merupakan NRA yang telah memperoleh maturity level 3-4 dalam *WHO NRA Benchmarking*, bahkan telah masuk dalam transisional *WHO Listed Authorities* (WLA).



Perwakilan dari M TaPS Indonesia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada B POM yang telah menerima dengan baik kunjungan kerja DDA Nepal dan memberikan *sharing knowledge* kepada DDA Nepal.

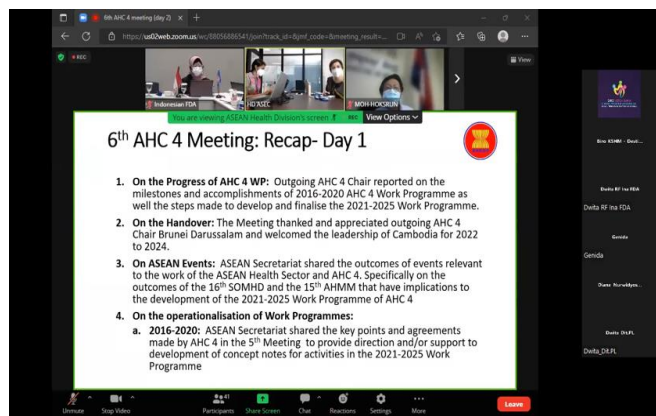


Dalam sesi penutupan, DDA Nepal menyampaikan apresiasi atas bantuan dan dukungan BPOM dalam *sharing knowledge* yang informatif serta diskusi yang interaktif. DDA Nepal juga mengharapkan kerja sama dengan BPOM terus berlanjut. MTaPS Indonesia juga mengapresiasi BPOM atas penyelenggaraan Program Learning Visit DDA Nepal serta menyampaikan kesiapan fasilitasi program-program kerja sama strategis lainnya dengan BPOM.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat akan berkoordinasi lebih lanjut dengan USAID MTaPS Indonesia untuk fasilitasi kegiatan lanjutan dan rencana kerja sama ke depan dengan DDA Nepal maupun dengan *National Regulatory Authority* (NRA) negara lainnya.

## ASEAN HEALTH CLUSTER 4 (AHC 4): ENSURING FOOD SAFETY SEBAGAI PENGAWALAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN NASIONAL

Sebagai bentuk komitmen BPOM dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan nasional, pada tanggal 10-11 Agustus 2022, BPOM berpartisipasi di tingkat regional dalam pertemuan ASEAN *Health Cluster 4* (AHC 4): *Ensuring Food Safety* melalui *video conference*. AHC 4 merupakan forum di bawah *Senior Officials Meeting on Health Development* (SOMHD) yaitu kerja sama ASEAN di pilar sosial budaya.



Pertemuan diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN dengan Kamboja sebagai *Chair* dan Indonesia cq. BPOM sebagai *Vice-Chair* pertemuan. Pertemuan membahas perkembangan pelaksanaan *Work Programmes AHC 4* sebagai bagian dari *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (APHDA) tahun 2021 – 2025.

Kehadiran delegasi BPOM dalam pertemuan ini bertujuan untuk mengawal berbagai kepentingan nasional di bidang pengawasan pangan khususnya pada isu-isu dimana Indonesia ditunjuk menjadi *lead country* untuk beberapa *project activity*. Pada

kesempatan tersebut delegasi Indonesia menyampaikan konsep kerja sama terkait *Facilitation on the implementation of the ASEAN Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety, Strengthening Rapid Response in Food Safety Incident and Crisis*, serta *ASEAN Risk Assessment Center (ARAC): Progress request form Risk Assessment on Arsenic and Cadmium in Rice*.

Delegasi Indonesia juga menyampaikan konsep kerja sama ASEAN terkait partisipasi konsumen dan pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan pangan di ASEAN *Member States (AMS)* dengan pembahasan identifikasi masalah keamanan pangan umum dan kelompok sasaran untuk Program Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Konsumen Keamanan Pangan di AMS, perencanaan lokakarya Regional Program CPE tentang Keamanan Pangan di AMS, serta survei/evaluasi program CPE Keamanan Pangan di masing-masing AMS.

Dra. Ratna Irawati Apt., M.Kes. selaku *Vice-Chair* menggantikan *Chair* memimpin pertemuan dengan mitra kerja sama ASEAN yaitu WHO, FAO, EU-ARISE Plus dan *International Life Sciences Institute (ILSI)* yang telah dan akan memberikan dukungan terhadap program kegiatan AHC 4 2021-2025.



## LEMBAGA TERBAIK BIDANG KEHUMASAN PADA AJANG ANUGERAH IPRAHUMAS TAHUN 2022

B POM mendapatkan prestasi dalam ajang Anugerah Ikatan Pranata Humas Indonesia (Anugerah IPRAHUMAS) Tahun 2022 yaitu sebagai Lembaga Terbaik bidang Kehumasan dalam Kategori Instansi Pemerintah Subkategori Lembaga. Anugerah IPRAHUMAS 2022 dilaksanakan pertama kali pada tahun ini dengan mengangkat tema “Langkah Baru Humas Pemerintah untuk Indonesia Pulih Bersama”. Tema ini menjadi daya ungkit untuk pulih dan bangkit bersama dari pandemi COVID-19. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 IPRAHUMAS Indonesia, perhelatan acara puncak penghargaan Anugerah IPRAHUMAS 2022 dilakukan secara daring pada tanggal 27 Agustus 2022.



Anugerah IPRAHUMAS 2022 merupakan penghargaan bergengsi bagi instansi dan Pranata Humas di seluruh Indonesia. Ajang ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan tugas kehumasan dalam membangun citra positif organisasi. Sebanyak 62 peserta melakukan pendaftaran, kemudian diseleksi hingga diperoleh 41 finalis. B POM mendapatkan posisi terbaik pada Kategori Instansi Pemerintah Subkategori Lembaga dengan poin sebesar 84,73 dengan judul tulisan “Sinergi, Kolaborasi, Pulih dari Pandemi”.

## **SEPTEMBER**

### **BPOM DAN SMESCO JALIN KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING UMKM**

BPOM dan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP KUKM), atau yang biasa disebut Smesco, berkolaborasi melakukan kerja sama untuk mendukung penuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kerja sama ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dan Smesco di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (06/09/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPOM, Rita Endang dan Direktur Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bidang Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan Olahan.



Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghasilkan produk obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan yang aman dan bermutu, sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan. BPOM berharap Smesco dapat mendukung UMKM ketiga komoditi tersebut dari

sisi digitalisasi, promosi, pemasaran, serta permodalan agar UMKM masuk dalam ekosistem digital.

Plt. Sekretaris BPOM, Rita Endang menyatakan BPOM sangat mendukung kerja sama ini, sehingga nantinya UMKM memiliki kemudahan berusaha, tingkat *ease of doing business* menjadi tinggi. BPOM berkomitmen akan terus mengembangkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan UMKM naik kelas dan berdaya saing.

## THE SECOND MEETING OF THE HEADS OF NATIONAL MEDICINE REGULATORY AUTHORITIES (NMRAs) OF OIC MEMBER STATES



Pada tanggal 5 – 6 September 2022 telah berlangsung pertemuan Kepala Otoritas Obat Nasional Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam/OKI (*The Second Meeting of The Heads Of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) of OIC Member States*) di Istanbul, Turki. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua dimana pertemuan pertama

NMRAs OIC diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21-22 November 2018 dan BPOM RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan ini bertemakan “**Access To Safe, Effective, Quality Medicines And Vaccines In OIC Member States**” yang dihadiri oleh 40 negara anggota OKI, termasuk Indonesia. Delegasi Indonesia terdiri dari Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt, MHA, Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, MPharm dan tim BPOM serta perwakilan Bio Farma.



Tujuan utama penyelenggaraan pertemuan kedua NMRAs OIC untuk membahas strategi yang telah dilakukan oleh negara anggota OKI dalam memperkuat peran NMRAs dalam memerangi pandemi terutama COVID-19 melalui *sharing knowledge* dan *experience* dalam pengembangan dan pembuatan obat-obatan dan vaksin. Selain itu, pertemuan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan *best practices* NMRAs OIC dalam memerangi obat palsu.



Di sela-sela pertemuan kedua NMRAs OICs, beberapa negara anggota OKI mengundang Delegasi Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral yaitu Turki (*Ministry of Health dan Turkish Medicines and Medical Devices Agency of Türkiye*), Arab Saudi (*Saudi Food and Drug Authority*), Afganistan (*Afghanistan Food and Drug Administration*), Yaman (*Ministry of Health*), Palestina (*the Palestinian MoH*) dan Maroko.

Peran Indonesia sebagai Tuan Rumah dan Ketua Biro Pertemuan Pertama NMRAs OKI sangat strategis dalam meningkatkan peran Indonesia di tingkat global, khususnya dalam forum kerja sama OKI, terutama dalam mendukung perkuatan kolaborasi diantara NMRAs negara-negara

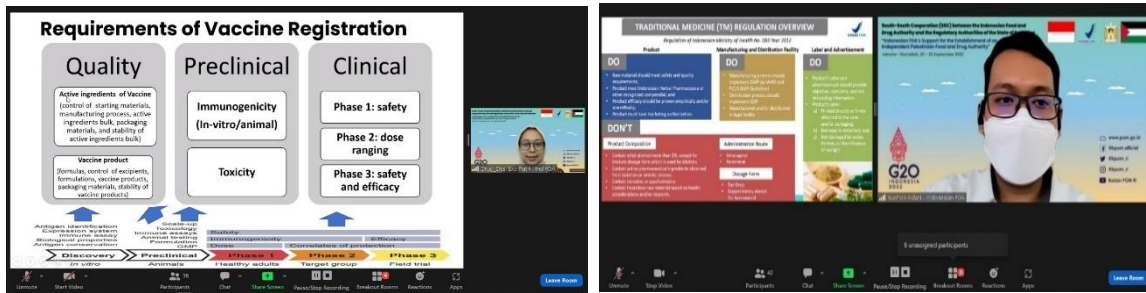
OKI guna mencapai kemandirian obat dan vaksin negara-negara OKI. Dalam hal ini, Indonesia siap mendukung dan berkolaborasi dengan Turki selaku Chair OIC NMRAs dan Sekretariat OKI dalam mendorong implementasi *Istanbul Declaration* dan *Plan of Action OIC NMRAs 2022-2024*. Hasil-hasil pertemuan bilateral, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas di negara-negara anggota OKI akan ditindaklanjuti guna meningkatkan peran BPOM di bidang pengawasan obat dan makanan, khususnya regulator-regulator di negara-negara OKI. Hal ini merupakan realisasi konkret dari komitmen Indonesia dalam Program Prioritas Nasional, khususnya melalui skema KSS, guna memberikan *technical assistance/capacity building* kepada negara-negara yang membutuhkan di Kawasan. Lebih lanjut peningkatan kerja sama juga dapat mendukung peningkatan ekspor produk obat dan makanan Indonesia ke negara-negara OKI.

## **KERJA SAMA SELATAN - SELATAN (KSS) BPOM UNTUK PALESTINA TAHUN 2022**

BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara *virtual* di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 20 – 22 September 2022. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator.



BPOM telah memberikan bantuan teknis kepada Palestina dalam bentuk pelatihan/*capacity building* selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pemberian bantuan teknis yang dilakukan melalui kerangka KSS ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas regulator obat di Palestina dalam memastikan produk yang diedarkan di Palestina merupakan produk yang aman, berkhasiat dan berkualitas baik.



Kegiatan KSS Palestina diikuti oleh 26 (dua puluh enam) peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina dengan materi pelatihan dibidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Pangan Olahan dan Laboratorium.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan peserta memberikan apresiasi kepada BPOM karena memiliki regulasi yang kuat dan prosedur yang jelas sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemberian ilmu dan pengalaman BPOM dalam *Clinical Trial*, GMP, serta *export import licensing* juga bermanfaat untuk membangun NRA Palestina. Selain itu, peserta juga memberikan apresiasi terhadap digitalisasi sistem pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan manfaatnya dalam melakukan *track and trace* serta pelaporan informasi.

Dalam rangka keberlanjutan program KSS Palestina di tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Humas tengah melakukan upaya percepatan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPOM dengan Kementerian Kesehatan Palestina.

## **KERJA SAMA SELATAN - SELATAN (KSS) BPOM UNTUK TIMOR LESTE TAHUN 2022**

BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi AIFAESA, I.P Timor Leste pada tanggal 19 - 27 September 2022 di Kupang. Sebagai bentuk komitmen BPOM untuk membantu Timor Leste dalam meningkatkan kapasitas di bidang pengawasan pangan (khususnya pengujian pangan), BPOM telah menyelenggarakan program KSS kepada Timor Leste sejak tahun 2018. Pada tahun ini BPOM RI melanjutkan KSS BPOM untuk Timor-Leste dalam bentuk Pelatihan dan Pengujian Sampel *Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár (AIFAESA)*, I.P Timor- Leste.





Kegiatan KSS Timor Leste diikuti oleh 4 (empat) pengawas pangan dari AIFAESA, I.P dengan narasumber dari PPPOMN, Direktorat Pengawasan, Peredaran Pangan Olahan dan Balai POM di Kupang. Materi pelatihan antara lain cara berlaboratorium yang baik, pengenalan teknik sampling, pengenalan produk dan jenis pengujian Kimia pangan dan mikrobiologi.

Dalam merespon isu pengawasan beras, telur, minuman beralkohol dan AMDK lokal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Timor-Leste, peserta juga melakukan praktek pengujian di laboratorium Balai POM di Kupang. Selain praktek di Laboratorium, peserta juga melakukan simulasi *on Site* sampling pangan di Sarana Peredaran (Hypermart Lippo Kupang).



Dalam kesempatan tersebut, Pihak AIFAESA, I.P menyampaikan apresiasi kepada BPOM dan berharap program KSS BPOM untuk Timor Leste dapat terus berlanjut untuk mendukung prioritas kebutuhan di Timor-Leste khususnya terkait teknis pengujian sampel.



Dalam rangka keberlanjutan program KSS Timor Leste di tahun 2023, saat ini Sekretariat Utama cq Biro Kerja Sama dan Humas tengah melakukan upaya pemberian hibah berupa peralatan laboratorium kepada AIFAESA, I.P. atas dukungan Kementerian Luar Negeri dan LDKPI, Kementerian Keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi fasilitas pengujian laboratorium pangan di Timor-Leste dan mendukung peningkatan kapasitas pengawasan pangan di Timor-Leste.

## ***KUNJUNGAN THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION AUSTRALIA***

BPOM telah menerima kunjungan dari Therapeutics Goods Administration (TGA) selaku otoritas regulator obat di Australia pada 27 dan 29 September 2022. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memetakan serta menentukan prioritas kegiatan kerja sama antara BPOM dengan TGA di bawah kerangka *Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP)*.



Kerja sama BPOM dengan TGA di bawah kerangka RSP telah dimulai pada tahun 2018, dan sejak itu telah dilaksanakan beberapa kegiatan, baik secara bilateral maupun dalam forum RSP bersama regulator obat negara lain dan mitra-mitra RSP. Pada kunjungan ini, TGA menyampaikan kegiatan RSP dalam memperkuat kapabilitas regulator, serta pembentukan *Indo-Pacific Regulatory Support and Safety Monitoring Program (RSSM)* untuk merespon pandemi COVID-19.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan unit-unit terkait di BPOM, dengan topik antara lain *Post-Market Surveillance and Recall, Laboratory Testing, Digital Innovation* dan *Business Process, Reliance Mechanism, Advanced Therapeutic Medicinal Products*, dan *Learning Management System (LMS)*.

Selanjutnya, BPOM dan TGA mengidentifikasi prioritas kerja sama di masa depan yang memerlukan dukungan TGA, antara lain pengujian laboratorium, kegiatan *internship* di TGA, *reliance mechanism*, dan pelatihan di bidang produk darah, khususnya terkait inspeksi GMP.

Kedua lembaga sepakat untuk meneruskan kerja sama yang akan berakhir pada Juni 2023.

## **OKTOBER**

### **STEERING COMMITTEE (SC) DAN MEMBER STATE MECHANISM ON SUBSTANDARD AND FALSIFIED MEDICAL PRODUCTS (MSM-SFMP)**



BPOM telah menghadiri pertemuan *Eleventh Meeting of the Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM-SFMP)* secara *daring* pada tanggal 19 – 20 Oktober 2022. Pertemuan MSM tersebut didahului oleh pertemuan *Steering Committee of the MSM* pada tanggal 18 Oktober 2022.

Pada pertemuan tersebut, dibahas beberapa agenda pertemuan antara lain: *Update by Secretariat on activities and budget to implement the workplan of the MSM, including prioritized activities for 2022 – 2023; WHO's participation in relevant global and regional initiatives; Updates from Vice-Chairs on any relevant initiatives in their region they are involved with/aware of; Proposed dates of the twelfth meeting of the Member States Mechanism; dan Any other business (Future Work of the Member States Mechanism).*

Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Penindakan, Plt. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (selaku Ketua Delri sekaligus *Spokesperson*), Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Cegah Tangkal, Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, perwakilan Kedepuitan I, IV, Pusdatin, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta perwakilan PTRI Jenewa.

Berkaitan dengan pertemuan tersebut, BPOM akan terus memantau perkembangan pembahasan isu-isu di forum MSM SFMP dan forum terkait lainnya serta menyampaikan *concern* BPOM dengan berkoordinasi dengan PTRI Jenewa dan WHO.



## KERJA SAMA BPOM DAMPINGI PEMBENTUKAN OTORITAS PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALESTINA INDEPENDEN

BPOM bersama Kementerian Kesehatan Palestina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Palestina telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 25 Oktober 2022. Penandatanganan dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina,



Mohammad Shtayyeh di Istana Bogor. MoU ini akan memfasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palestina. Melalui kerja sama ini, Otoritas POM Palestina akan mengatur kerja sama bidang fungsi regulator produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan.

Kerja sama ini merupakan aksi nyata Indonesia dalam mendukung Palestina, khususnya dalam hal pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, BPOM menjadi contoh bagi dunia internasional dalam meningkatkan sumber daya manusia dan membantu Palestina dalam membangun regulasi pengawasan obat dan makanan yang mandiri.

Sejak 2018-2022, BPOM telah aktif memberikan bantuan berupa pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas regulator Palestina. Berbagai pelatihan tersebut, antara lain Program Strengthening Cooperation in the Field of Drug Control through *Knowledge Sharing* (14-19 Oktober 2018 di Jakarta); Pelatihan *Good Regulatory Practice in Medicine* (5-6 Oktober 2019 di Amman, Yordania); *Virtual Training* program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina (23-25 November 2020 di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina); dan *Virtual Training* lanjutan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina (20-22 September 2022 di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina).

Selain pelatihan teknis, BPOM juga telah menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Pemerintah dan rakyat Palestina sendiri memiliki akses terbatas terhadap obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan. Keterbatasan akses Obat dan Makanan juga dialami oleh para pengungsi Palestina, baik yang berada di Gaza dan Tepi Barat, serta di luar Palestina, termasuk di Yordania.

Dampak penandatanganan perjanjian ini juga dapat memperkuat kerja sama ekspor impor antara Palestina dan Indonesia. Dengan terbentuknya badan pengawas obat dan makanan yang mandiri di Palestina, akan terbentuk lembaga untuk persetujuan obat-obatan aman.

Langkah ini menunjukkan kepedulian konkret dan nyata Indonesia terhadap isu Palestina serta membantu warga Palestina yang kurang akses terhadap obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan.

## **NOVEMBER**

### **BPOM BANGUN SINERGI DENGAN PMI WUJUDKAN KEMANDIRIAN PRODUK DARAH DALAM NEGERI**



BPOM menggagas pertemuan lintas sektor yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), Selasa (22/11/2022). Kegiatan yang mengambil tema “Forum Lintas Sektor Pengembangan Industri Fraksionasi Plasma Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri” bertujuan untuk menyinergikan dukungan dan upaya berkelanjutan bagi terwujudnya kemandirian produk darah dalam negeri.

Pada dengan kegiatan tersebut, Kepala BPOM dan Ketua Umum PMI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperbarui kerja sama antara BPOM dengan PMI dalam rangka peningkatan mutu produk darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI). BPOM telah menjalin kerja sama dengan PMI yang mengelola UDD di dalam negeri sejak tahun 2019. Dukungan BPOM diberikan dalam bentuk asistensi regulatori, pra-sertifikasi, serta sertifikasi CPOB kepada 18 UDD PMI di seluruh Indonesia. Pembaruan MoU ini memperluas cakupan kerja sama tersebut, yaitu untuk penyusunan regulasi terkait produk darah, pengembangan kurikulum pelatihan bagi inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) BPOM, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia BPOM dan PMI.

Kepala BPOM optimis dukung kebangkitan industri farmasi di Indonesia melalui pengawalan, penjaminan mutu mulai dari bahan baku hingga produk jadi, serta proses registrasi produk plasma untuk diedarkan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai pendampingan penerapan CPOB pada pelayanan UTD sebagai penyedia bahan baku fraksionasi plasma, pelatihan, serta asistensi regulatori percepatan sertifikasi-sertifikasi UTD yang potensial.



## **PENANDATANGANAN MOU ANTARA BPOM DENGAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

Pada tanggal 25 November 2022, telah berlangsung Penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* antara BPOM dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito bersama Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso.



MoU ini merupakan pembaruan kerja sama sebelumnya yang telah diwujudkan dengan berbagai implementasi nyata, seperti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi obat dan makanan, pelatihan fasilitator Kwartir Daerah, bimbingan teknis kader keamanan pangan, dan berbagai Giat Pramuka Saka POM lainnya.

Sejak tahun 2018, BPOM telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan Rintisan Saka POM bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Melalui Rintisan Saka POM ini, BPOM telah mengembangkan 3 (tiga) Krida sebagai wadah kegiatan, yaitu Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan.



Kepala BPOM menjelaskan sasaran dibentuknya Saka POM adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kecakapan anggota Gerakan Pramuka di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kepala BPOM berharap mendapat dukungan dari Kwarnas, Kwarda, dan Kwartir Cabang (Kwarcab) seluruh

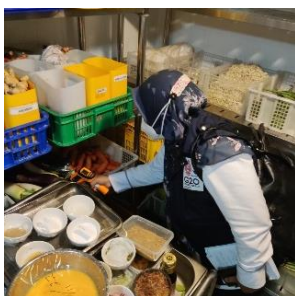
Indonesia dalam pengesahan Saka POM segera terwujud, pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2023 yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso turut berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan dijalankannya berbagai aktivitas yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## **BPOM DUKUNG PENUH RANGKAIAN PERTEMUAN PRESIDENSI G20 HINGGA KTT G20 DALAM PENGAWALAN KEAMANAN PANGAN**



BPOM dimandatkan oleh Presiden sebagai panitia nasional bidang kesehatan yang bertugas untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia, termasuk di bidang keamanan pangan. Dalam hal ini, pengawalan keamanan pangan yang dilakukan BPOM yaitu Kitchen Inspection, Food Security, Stikerisasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di sarana peredaran, dan pengawalan implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Pengawalan keamanan pangan dilakukan sebelum pelaksanaan food security untuk memastikan tempat pengolahan pangan telah melaksanakan kitchen inspection pada 4 lokus utama kegiatan KTT G20 dan 18 hotel lainnya yang merupakan tempat penginapan para tamu negara. Sampling dan pengujian bahan baku untuk sajian tamu negara juga dilakukan saat kitchen inspection.



Sedangkan pengawalan keamanan pangan yang dilakukan pada hari H berupa sampling dan pengujian sajian makanan/minuman yang diperuntukkan untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan tamu penting lainnya seperti Menteri. Dalam hal ini, hanya sajian pangan yang dinyatakan aman oleh BPOM yang dapat disajikan kepada tamu negara.

Tidak kurang dari 142 retail pangan modern dan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Badung (termasuk Kawasan Nusa Dua) dan Kota Denpasar diberikan stiker SMKPO yang berfungsi sebagai bentuk pengawalan keamanan dan mutu pangan serta menjangkau komitmen retail dalam menyediakan produk sesuai standar keamanan pangan.



Pengawalan keamanan pangan juga dilakukan melalui pengawalan implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada produk pangan yang menjadi souvenir ataupun dipamerkan pada acara G20

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Instansi

#### A.1. Visi dan Misi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang memberikan dukungan manajemen di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian visi dan misi BPOM yaitu:

Visi:

“Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan masyarakat dan daya siang bangsa”

Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

#### A.2. Tujuan

Sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Utama BPOM, yaitu:

- a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama; dan
- c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.

#### A.3. Tugas dan Fungsi

Untuk memastikan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut, serta berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

#### A.4. Budaya Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat senantiasa mengedepankan penerapan *Core Value* Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Budaya Organisasi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. *Core value* dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

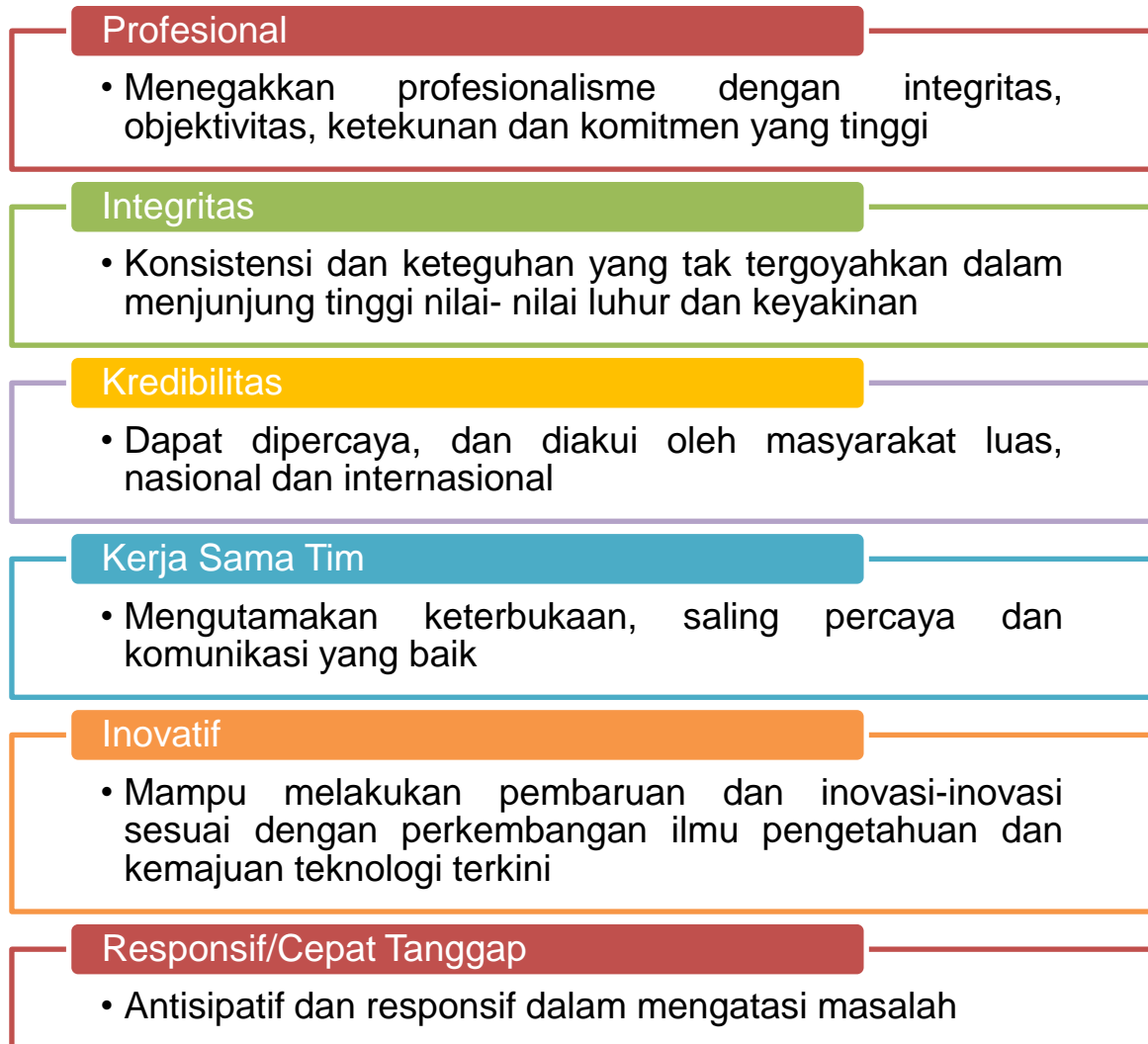
Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Sebagai ASN, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menerapkan *core value* BERAKHLAK seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Core Value BERAKHLAK**

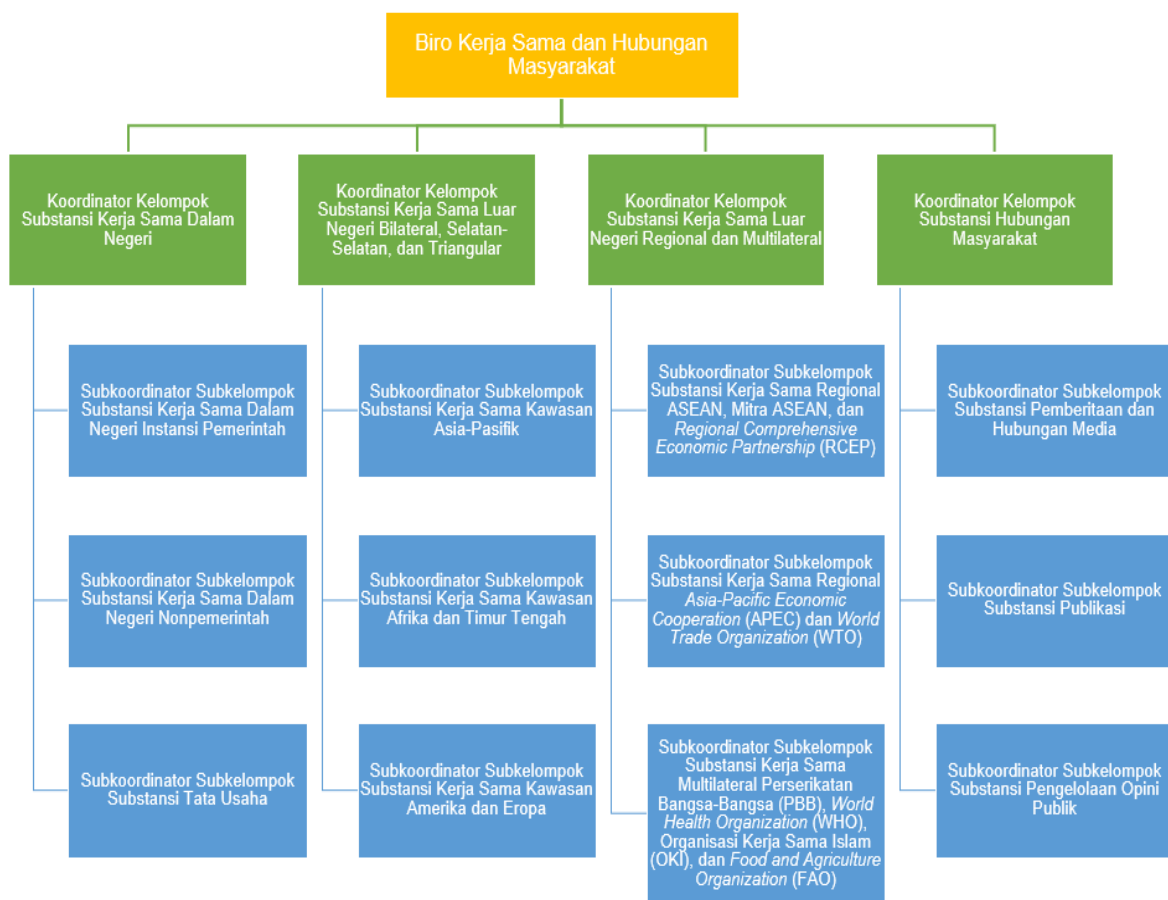
Core value ini senantiasa diterapkan melalui 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan seperti pada Gambar 2:



Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR

#### A.5. Struktur Organisasi

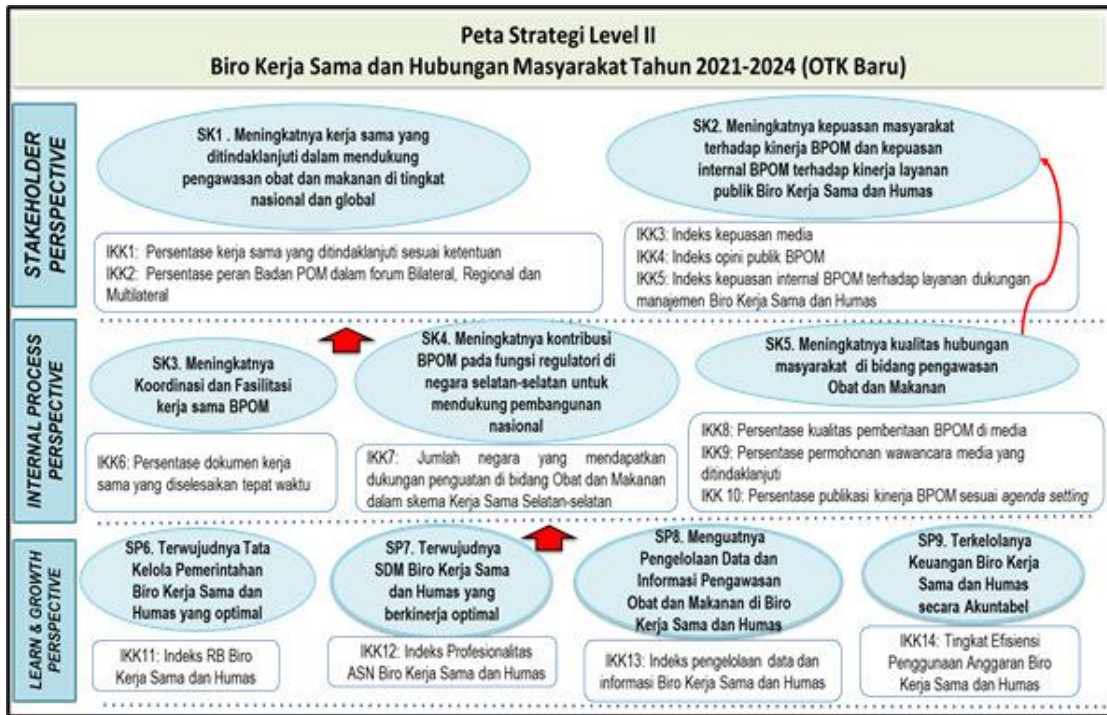
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama BPOM. Sejalan dengan penyederhaaan organisasi dan birokrasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung dengan Jabatan Fungsional dengan dukungan coordinator dan sub koordinator, seperti pada Gambar 1.



**Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

**B. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator**

Untuk mengukur kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun peta strategi, sasaran dan indikator sebagaimana Gambar 4. Perkembangan situasi dan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal mempengaruhi fungsi strategis BPOM dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4. Gambar Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2022, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki 9 Sasaran Program dan 14 indikator sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
2.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	86
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	74,5
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks opini publik BPOM	79

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,85
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83
7.	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	1
8.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
9.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
10.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5
12.	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82
13.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25
14.	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90 (Efisien)

## BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

### A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh 4 (empat) kelompok substansi dengan jumlah pegawai pada tahun 2022 terdiri dari 63 orang, yang terdiri dari 42 orang PNS dan 21 orang staf pramubakti.

#### A.1. Data Kepegawaian

##### 1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat saat ini didukung dengan mayoritas SDM yang berpendidikan Pascasarjana (S2) dan Sarjana dalam usia produktif. Gambaran SDM Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan pendidikan seperti pada Tabel 2.

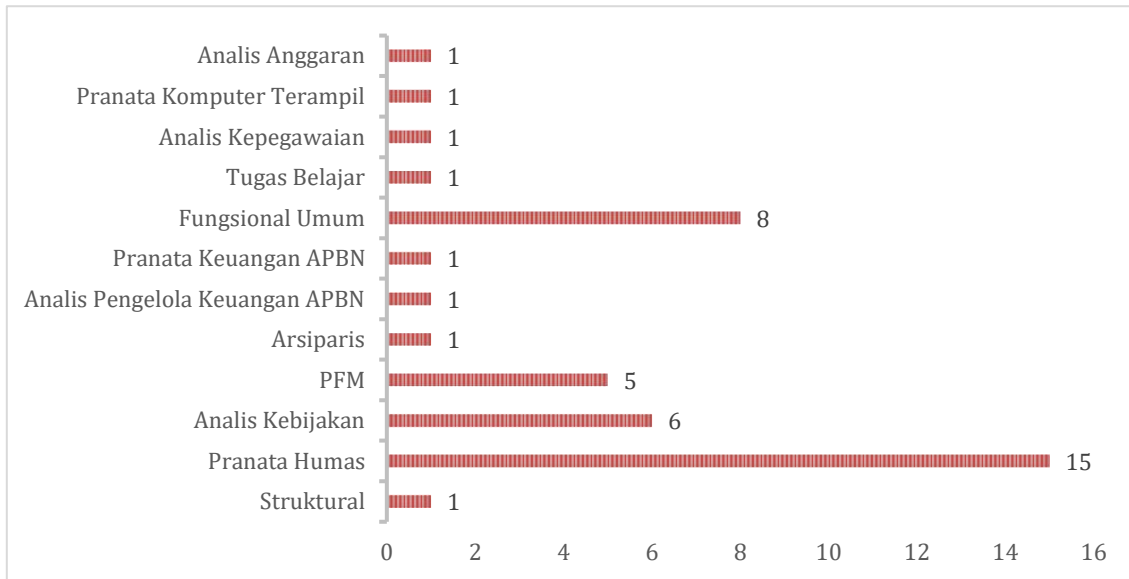
**Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	ASN		Pramubakti	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	11	17,46%	0	0,00%
S1 Apoteker	4	6,35%	3	4,76%
S1	21	33,33%	14	22,22%
D3, D4 dan sarjana Muda	5	7,94%	3	4,76%
SLTA/Sederajat	1	1,59%	1	1,59%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>66,67%</b>	<b>21</b>	<b>33,33%</b>

Dari latar belakang pendidikan, sebanyak 55,56% pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah Sarjana, diikuti oleh pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 17,46%, pendidikan Diploma dan SLTA 15,87% dan S1 Apoteker sebanyak 11,11%.

##### 2) Berdasarkan Jabatan

Dari 42 orang PNS, 1 (satu) orang menduduki jabatan struktural, 32 orang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), dan 8 orang menduduki jabatan fungsional umum. Selain itu, terdapat 1 (satu) Pejabat Fungsional yang mengikuti Tugas Belajar. Gambaran data pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

### 3) Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2022, kebutuhan SDM di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
1	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	1	0
2	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
3	Arsiparis Mahir	1	0	1
4	Arsiparis Terampil	2	1	1
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
6	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
7	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	1
10	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6	6	0
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	9	3	6
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	15	6	9
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	23	6	17
15	Perencana Ahli Muda	1	0	1
16	Perencana Ahli Pertama	2	0	2
17	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	1	0
18	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
19	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
20	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
21	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0
22	Analisis Kerjasama Luar Negeri	0	2	0

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
23	Analisis Perencana	0	1	0
24	Analisis Data dan Informasi	0	1	0
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	0	1	0
26	Pranata Komputer Keahlian	0	1	0
<b>Total</b>		73	34	45

## A.2. Kebutuhan Pelanggan

### A.3. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2022, yaitu Tugas Belajar atas nama Wulan Kusumaningtyas, S.Sos. dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Jakarta.

Sedangkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
- 2) Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
- 3) Penyelenggaraan *Training of Trainer* Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Tahun 2022;
- 4) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: e-Learning Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
- 5) Penyelenggaraan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) *Coaching* Pimpinan Tahun 2022.

## B. Sarana dan Prasarana

Biro Kerja Sama dan Humas menempati ruangan yang berlokasi di gedung Panacea Lantai 5 dan 6 Untuk mendukung terlaksananya kegiatan di unit kerja, terdapat sarana dan prasarana kantor yang memadai. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah diharapkan	Tersedia	Kebutuhan
1	PC	63	43	20
2	Laptop	63	47	16
3	Printer	20	15	5
4	Scanner	6	3	3
5	Proyektor	4	4	-
6	Camera Digital	12	11	1
7	Handycam	7	6	1
8	Video Conference	3	2	1

### C. Anggaran

Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM pada tahun awal tahun 2022 adalah sebesar **Rp 14.796.790.000**. Namun, dengan adanya Penghematan Anggaran APBNP, anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar **Rp. 11.981.934.000**. Rincian anggaran dan realisasi sebelum maupun setelah pemotongan anggaran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>3158 Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM</b>				11.981.934.000	11.928.110.871	99,55%
	<b>3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>105,56%</b>	4.924.117.000	4.922.571.508	99,97%
1	051 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral	30	31	103,33%	2.148.913.000	2.148.744.420	99,99%
2	052 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	30	33	110,00%	810.387.000	809.813.091	99,93%
3	053 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	30	31	103,33%	1.366.977.000	1.366.336.733	99,95%
4	054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1	1	100%	597.840.000	597.677.264	99,97%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>3158.EBA.003 Layanan Dukungan Internal Manajemen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>6.352.486.000</b>	<b>6.300.591.047</b>	<b>99,18%</b>
1	051 Pemberitaan dan Hubungan Media	1	1	100%	1.897.966.000	1.888.404.288	99,50%
2	052 Publikasi	1	1	100%	2.358.132.000	2.317.036.448	98,26%
3	053 Pengelolaan opini publik	1	1	100%	2.096.388.000	2.095.150.311	99,94%
	<b>3158.PEE.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>705.331.000</b>	<b>704.948.316</b>	<b>99,95%</b>
1	051 Penyelenggaraan kerja sama dengan negara di Asia Pasifik/Afrika	1	1	100%	267.348.000	267.065.716	99,89%
2	052 Penyelenggaraan kerja sama dengan Negara Anggota OKI	1	1	100%	437.983.000	437.882.600	99,98%

**BAB III  
HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**A. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global**

<b>SK1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global</b>	
IKK 1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
IKK 2	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

**A.1. IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$f=(d/cx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	86	86,65	100,76	2.120.380	2.119.695	99,97

Sasaran Kegiatan ke-1 (SK1) Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global, diturunkan menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- a. IKK1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan; dan
- b. IKK2 Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Target IKK1 sebesar 86 terpenuhi dengan realisasi sebesar 86,65 atau 100,76% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK1 adalah sebesar Rp. 2.120.380.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.119.694.650 atau 99,97% dengan kategori Baik.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK1, antara lain:

- a. Dukungan tim koordinasi kerja sama dalam negeri dari unit-unit kerja pusat maupun Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia. Tim ini tergabung dalam forum komunikasi melalui *Whatsapp Group* yang memudahkan penyampaian informasi terkait kerja sama. Anggota tim diperbarui setiap awal tahun dan setiap anggota baru dapat langsung bergabung ke forum komunikasi.

- b. *Monitoring* dan evaluasi implementasi kerja sama secara berkala setiap triwulan (3 bulan).

Monitoring dan evaluasi (monev) penting dilakukan untuk memantau implementasi kerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Monev dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk meningkatkan pemenuhan rencana kerja yang telah disusun antara unit pengusul dengan mitra kerja sama, selama jangka waktu kerja sama. Apabila terdapat kerja sama yang belum terpenuhi di awal tahun, maka unit pengusul dapat segera merumuskan tindak lanjut implementasi kerja sama pada periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan seluruh kerja sama telah dapat terimplementasi sesuai rencana kerja sebelum jangka waktu kerja sama berakhir. Monev kerja sama juga merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan urgensi perpanjangan kerja sama setelah jangka waktu kerja sama berakhir. Kerja sama yang terimplementasi dengan baik dapat diperpanjang atau diperbarui, namun sebaliknya, kerja sama yang tidak terimplementasi dengan baik akan menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang atau diperbarui.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang dikembangkan oleh ANRI. Sistem ini memungkinkan pemantauan permohonan usulan kerja sama yang disampaikan oleh unit kerja. Selain itu, juga sedang dikembangkan Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) yang akan dimanfaatkan untuk pengajuan usulan kerja sama, *monitoring* revidu dan telaah *legal drafting*, serta persetujuan pimpinan. Sistem ini juga terhubung dengan database kerja sama yang telah ditandatangani.

Dalam forum multilateral telah dilakukan WHO *follow-up visit Benchmarking* NRA assessment dan WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023.

Di lain hal, pada forum bilateral, kerja sama dengan mitra yang ditindaklanjuti berupa kolaborasi BPOM dengan regulator mitra dalam rangka peningkatan *Capacity Building* di bidang pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
1	Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertemuan pembahasan topik-topik terkait <i>Reliance, ATMP, lab testing, Post-Market Surveillance and Recall, Business Processes</i>, 27 dan 29 September 2022</li> <li>2) Perwakilan TGA menjadi narasumber pada <i>Business Forum</i> OT, SK, KOS pada <i>BPOM Week</i> di Expo 2020 Dubai</li> <li>3) <i>TGA virtual workshop on quality evaluation of stability studies for medicines</i> (24 Maret 2022)</li> <li>4) <i>Workshop GMP for ATMP</i> (4-6 Oktober 2022)</li> </ol>

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
2	Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) India	Perwakilan BPOM menyampaikan paparan mengenai sistem regulasi farmasi di Indonesia dan <i>Overview</i> registrasi OT, SK KOS pada pertemuan India-Indonesia Pharmaceutical and Health Industry Forum, 27 Juni 2022
3	Japan International Cooperation Agency (JICA)	1) Workshop <i>PV inspection guideline</i> 17-18 Februari 2022 2) <i>Technical Training Programme on Bio-Risk Management in Laboratories</i> 10-14 Januari 2022 3) Penerimaan hibah alat dan reagen laboratatorium
4	Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko	Penyampaian Surat Deputi 3 mengenai jaminan keamanan dan kualitas produk pada <i>Health Certificate/Free Sale</i> yang diterbitkan BPOM dengan <i>Digital Signature</i> , 13 Januari 2022
5	The Ministry of Food and Drug Safety of The Republic of Korea (MFDS)	<i>Seminar on Safety Governance of Agriculture-Seminar on Safety Governance of Agriculture-Livestock and Fisheries Products for Asian Countries</i> , 11-15 November 2022
6	Saudi Food and Drug Authority (SFDA)	1) Pegawai SFDA melakukan Pelatihan DTP Training di PPPOMN, BPOM pada 24 Oktober - 4 November 2022 2) Pada tanggal 21 Oktober 2022, SFDA mengajukan sharing informasi terkait isu obat cair dan sirup 3) BPOM sebagai <i>Competent Authority</i> memfasilitasi ekspor pangan mengandung hewan ke Arab Saudi untuk keperluan haji dan umroh
7	National Medical Products Administration (NMPA)	1) Pertukaran informasi contact person untuk penyelenggaraan simposium laboratatorium. 2) Pada 2 Maret 2022, 2 pejabat NMPA menjadi narasumber pada kegiatan <i>Business Forum on Traditional Medicines, Health Supplements and Cosmetics</i> yang diselenggarakan BPOM dalam rangka Expo Dubai 2020.
8	Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)	1) Working Group meeting pertama dengan MHLW/PMDA 2) Penyelenggaraan pelatihan melalui PMDA-ATC sebagai berikut: i. <i>PMDA-ATC Quality Control (Herbal Medicine) Webinar 2022: 23 – 25 August 2022;</i> ii. <i>PMDA-ATC &amp; U.S. FDA Pediatric Review Webinar 2022: 12 – 15 September 12 2022;</i> iii. <i>PMDA-ATC GMP Inspection Webinar 2022: 25 – 26 Oktober 2022</i>
9	University of Wisconsin Madison Amerika Serikat	Diskusi untuk membahas <i>mutually beneficial projects</i> dengan Elise dan Jennifer UW-Madison sebagai implementasi MoU pada: - Virtual meeting 12 April dan 3 Juni 2022 - Pertemuan di UW-Madison 14 Oktober 2022
10	Ministry of Health of The State of Palestine	BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara virtual di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 20 – 22 September 2022

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
11	Ministry of Health and Prevention of the United Arab Emirates	1) <i>Business Matching One-on-one</i> pada tanggal 9 September 2022 2) Kunjungan Industri farmasi UAE ke fasilitas industri farmasi Indonesia pada tanggal 18, 20 dan 21 Juli 2022 3) <i>Business Forum on Pharmaceutical and Medical Products</i> pada tanggal 19 Juli 2022 4) <i>Business forum</i> pada tanggal 8 September 2022

#### A.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	86	86,59	100,68	2.017.429	2.016.779	99,97

Target IKK2 sebesar 86 terpenuhi dengan realisasi sebesar 86,59 atau 100,68% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK2 adalah sebesar Rp. 2.017.429.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.016.779.195 atau 99,97% dengan kategori Baik.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK2, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM, Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, dll terkait penyampaian masukan;
- Penyusunan telaah, kajian serta usulan posisi BPOM terkait perundingan atau forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Pada tahun 2022, peran BPOM dalam forum bilateral, regional dan multilateral berupa intensifikasi/fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kertas posisi BPOM dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

a) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri bilateral sebagai berikut:

No	Mitra Kerja Sama	Isu
1	Ministry of Climate Change and Environment (MoCCA), Persatuan Emirat Arab (PEA)	Penjajakan penyusunan MoU untuk memfasilitasi kemudahan ekspor pangan Indonesia ke PEA dan kolaborasi pengawasan pangan yang bersinergi dengan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk industri pangan di Indonesia
2	Kementerian Kesehatan Kenya	Penjajakan penyusunan MoU untuk memfasilitasi dukungan peningkatan kapasitas regulatori bagi PPB serta kemudahan akses obat di Kenya
3	Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya	Penyusunan program-program regulatori untuk kemudian menjadi bagian implementasi Memorandum of Understanding (MoU) BPOM dengan Kemkes Kenya
4	UN-Habitat Secretariat Kenya	Pertemuan menjajaki berbagai program yang melibatkan multi stakeholders terutama di bidang awareness of healthy food and nutrition bagi masyarakat urban dalam rangka peran BPOM untuk mengedukasi masyarakat tentang pangan yang aman.
5	United Nations Environments Programme (UNEP) Kenya	Pembahasan mengenai langkah-langkah strategis terkait isu makanan baik dari segi pengolahan maupun pengemasan dan dampaknya bagi lingkungan serta optimalisasi peran BPOM sebagai badan regulator obat dan makanan terhadap isu dimaksud.
6	Duke-National University of Singapore (DUKE-NUS), Centre of Regulatory Excellence (CoRE), Singapura	Penjajakan kerja sama peningkatan kapasitas pegawai regulatori obat dan obat tradisional serta pembentukan MoU antara kedua instansi.
7	Harvard Medical School Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ibu Kepala BPOM menjadi dosen tamu (<i>Guest Lecture</i>) guna menyampaikan isu-isu terkait <i>Pandemic, Leadership, Collaboration and Political Economy Dynamic in Indonesia National Health</i> pada Department of Global Health Delivery, Harvard Medical School (HMS), Harvard University, di Boston, Massachusetts.</li> </ul>

No	Mitra Kerja Sama	Isu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjajakan kerja sama program pendidikan post graduate dan training/workshop mengenai <i>clinical investigation</i></li> </ul>
8	Labcentral dan Boston Innovation Centre (Johnson & Johnson Innovation Centre)	Penjajakan pembangunan laboratorium inkubator di Indonesia dengan melibatkan LabCentral dan Johnson & Johnson Innovation Lab (JLABS) serta startup farmasi dari Indonesia.
9	Marron Foods	Pengawasan penjajakan kerja sama antara industri pangan Indonesia dengan industri olahan susu Pabrik Marron Foods di Wisconsin dalam rangka benchmarking pengolahan susu berbasis teknologi instantizing, aglomerasi dan susu analog.
10	United States of Food and Drug Administration	Permintaan informasi penanganan BPOM tentang cemaran etilen glikol (EG) dan dietilenglikol (DEG) pada obat sirup anak terkait kasus gagal ginjal akut pada anak
11	Pharmacopoeia Commission for Indian Medicines (PCIM-H), India	<i>Business Forum</i> Business Forum Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OT, SK, dan Kos). Pihak PCIM-H menyampaikan mengenai standar dan regulasi yang berlaku untuk impor obat tradisional di India, dan regulasi produk obat tradisional India termasuk homeopathy
12	Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) Republik Turki	<i>Business Forum</i> Business Forum Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OT, SK, dan Kos). Pihak MAF menyampaikan mengenai <i>Import and Export Requirements for Processed Plant Origin Food in Turkey</i>

b) Perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
1	Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA)	<i>Rules of Origin</i> (ROO) dan <i>Product Specific Rules</i> (PSR)	Penyampaian posisi tarif produk binaan BPOM, khususnya pada kategori pos tariff 3004 ( <i>Medicaments</i> ) semula <i>Change of Tariff Sub-heading</i> (CTSH) kemudian diusulkan menjadi <i>Change of Tariff Heading</i> dan 3006 ( <i>Pharmaceutical goods; waste pharmaceuticals</i> ) semula CTSH kemudian diusulkan menjadi <i>Wholly Obtained</i> .

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
		<i>Intellectual Property Rights (IPR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan klausul dari EU mengenai jangka waktu paten pada <i>Article X.41 Extension of the Period of Protection Conferred by a Patent on Medicinal Products</i>; dan</li> <li>• Usulan klausul dari EU mengenai kerahasiaan data registrasi obat baru pada <i>Article X.44 Protection of Data Submitted to Obtain an Authorization to Put a Medicinal Product on the Market</i>.</li> </ul>
		<i>Trade in Good (TiG)</i>	<i>Article X.13 Origin Marking</i> mengenai penggunaan atau pencantuman “Made in EU” yang tetap harus memenuhi persyaratan penandaan yang diatur dalam aturan dan regulasi Indonesia khususnya BPOM untuk komoditi Obat dan Makanan.
		<i>Technical Barrier to Trade (TBT)</i>	Menyepakati <i>Artikel X-8 Marking and labelling</i> .
2	Indonesia-Australia CEPA	<i>Economy Cooperation</i>	Penyusunan proposal BPOM dalam kegiatan implementasi IA CEPA dalam kerangka <i>Economic Cooperation Program Katalis (Katalis)</i> dalam mendukung pengembangan perdagangan dan investasi Indonesia dan Australia.
3	Indonesia-Canada CEPA	<i>National Treatment and Market Access (NTMA)</i>	Penyampaian posisi pos tarif komoditi binaan BPOM sebanyak 135 pos tarif dan penentuan posisi BPOM terhadap rekomendasi <i>Initial Offer list ICACEPA</i> .
		<i>Sanitary and Phytosanitary (SPS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan posisi BPOM terhadap <i>Article X.10 Import Check</i> sebagai pembina pada komoditi pangan olahan yang risikonya rendah dibandingkan olahan hewan atau tumbuhan. sehingga Import Check secara fisik/ pemeriksaan sarana tidak selalu dilakukan oleh BPOM, sehingga Import Check hanya dilaksanakan.</li> </ul>

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Posisi BPOM pada X.11 Audit terkait mekanisme audit atau inspeksi dilakukan apabila terdapat kasus tertentu/ <i>risk-based inspection</i>.</li> </ul>
		IPR	Meninjau kembali proposal teks untuk <i>trademark</i> dan <i>industrial designs</i>
		TBT/ <i>Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)</i>	Posisi mengenai Article X.6: Conformity Assessment atau penilaian kesesuaian
		<i>E-commerce (ECOM)</i>	Pembahasan mengenai pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, termasuk pertukaran informasi. BPOM fokus pada pengembangan penjualan produk Obat dan Makanan yang diperdagangkan secara digital melalui platform <i>e-commerce</i> .
		<i>Rules of Origin (ROO)</i>	Penyiapan posisi <i>Rules of Origin (ROO)</i> dan <i>Product Specific Rules (PSR)</i> komoditi di bawah binaan BPOM.
4	IEFTA CEPA	<i>Cooperation and Capacity Building (CCB)</i>	Penyusunan <i>roadmap</i> implementasi program tahun 2023.
		PSR	Terkait dengan BPOM, pembahasan difokuskan pada <i>HS Code</i> pada Chapter 30 (CTH) yang beririsan dengan Kementerian Kesehatan.

- c) Penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin;
- d) Penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, *The Meeting of JAIF Project, Symposium* dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, PPWG, AFTCL ke-21, dll;

- e) Posisi BPOM dalam Business Forum BPOM-Kemkes-Industri Farmasi Indonesia dan PEA tanggal 19 Juli 2022;
- f) Penyampaian masukan BPOM pada Perundingan Iran Indonesia PTA;
- g) Partisipasi BPOM dalam All Rusian GMP Conference 7-8 September 2022;
- h) Penyampaian informasi BPOM terhadap perkembangan pengawasan Obat Sirup (EG dan DEG);
- i) Penyampaian informasi dari BPOM mengenai perkembangan kasus kontaminasi EG dan DEG pada obat sirup dan cair pada anak pada tanggal 17 November 2022;
- j) Penyampaian posisi BPOM mengenai pencabutan larangan impor produk daging dan unggas serta pembahasan perijinan impor produk hewan lainnya ke Arab Saudi pada 20 Desember 2022;
- k) *ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, The Eleventh Meeting of MSM on SFMP, WHO SEARN Steering Group Meeting, dll.*
- l) Partisipasi BPOM pada Pengawasan Keamanan Pangan Presidensi G20, Sidang Komite SPS ke 82, 83, 84, dan Sidang Komite TBT.

**B. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas**

<b>SK2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas</b>	
IKK 3	Indeks kepuasan media
IKK 4	Indeks opini publik BPOM
IKK 5	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

### B.1. IKK 3: Indeks kepuasan media

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	74,5	73,55	98,72	360.614	360.368	99,93

Realisasi Indeks kepuasan media pada Tahun 2022 adalah sebesar 73,55 dari target sebesar 74,5, sehingga capaian indikator adalah 98,72% dengan kategori “Belum memenuhi ekspektasi” (kuning).

Survey Indeks Kepuasan Media BPOM merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi media sekaligus memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kehumasan BPOM.

Indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan karena salah satu faktor yang turut mempengaruhi persepsi dan penilaian media terhadap layanan kehumasan BPOM pada tahun 2022 adalah pada periode berkembangnya isu terkait sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol.

Pada momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu tersebut, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.

Periode pengambilan data survei Indeks Kepuasan Media dilakukan pada triwulan akhir tahun 2022. Kehadiran isu sirup obat mengandung Etilan Glikol/Dietilen Glikol tersebut sedikit banyak turut berpengaruh terhadap hasil penilaian media saat periode pengambilan data.

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari survei terhadap kepuasan media. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM. Dari hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM.

Pengukuran Indeks ini mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Terjalannya komunikasi yang baik, serta perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Pengemasan informasi publik BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos secara jelas dan mudah dipahami.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan BPOM terkait pelaksanaannya.
- b. Terus aktif melakukan update database jawaban pertanyaan wawancara untuk membantu mempercepat proses penyiapan bahan untuk menjawab pertanyaan media.
- c. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan

memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.

- d. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media terupdate dengan informasi BPOM.

## B.2. IKK 4: Indeks Opini Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks opini publik Badan POM	79	84,76	107,29	1.310.561	1.310.272	99,98

Realisasi Indeks Opini Publik Badan POM pada Tahun 2022 adalah sebesar 84,76 dari target sebesar 79, sehingga capaian indikator adalah 107,29% dengan kategori “Baik” (Hijau). Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik. Survei Opini Publik terhadap BPOM merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan margin of error sebesar 2,45% pada selang kepercayaan 95%. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: BPOM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: BPOM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: BPOM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: BPOM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: BPOM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.

6. Aspek Isu Obat dan Makanan: BPOM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik BPOM tahun 2022 sebesar 84.76 dengan kategori nilai sangat percaya. Nilai ini meningkat 2.21 poin dibanding tahun 2021 (82.55). Indeks Opini Publik masing-masing aspek mengalami kenaikan. Peningkatan indeks tertinggi tampak pada aspek peraturan (meningkat 3.00 poin) dan peningkatan indeks terendah pada aspek isu obat dan makanan (meningkat 1.52 poin). Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek dengan pencapaian paling tinggi terlihat pada aspek kesehatan (85.94). Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek isu obat dan makanan (83.42).

Beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.
4. Menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM melalui kanal resmi BPOM maupun kepada media, sehingga media dan masyarakat luas ter-update dengan informasi BPOM.
5. Peningkatan awareness terkait pengelolaan media kepada kepala unit kerja dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka komunikasi, koordinasi, dan perluasan informasi publik bagi masyarakat melalui media di daerah masing-masing.
6. Merespon isu obat dan makanan yang terjadi di masyarakat dan memberikan edukasi terkait isu tersebut.

### B.3. IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
A	B	c	d	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,85	3,83	99,48%	282.521	278.877	98,71

IKK 5 ditujukan untuk mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh *stakeholder* terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama.

Survey mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang mencakup:

1. Layanan Penyusunan MoU/PKS dalam negeri
2. Layanan Penyusunan MoU/PKS luar negeri
3. Layanan Penyusunan Bahan Kerja Sama Luar Negeri (Kertas Posisi, *Talking Point*, dll)
4. Layanan Administrasi/Persetujuan dan Exit Permit Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Layanan Export Consultation Desk (ECD)
6. Layanan Monitoring Pemberitaan terkait Obat dan Makanan
7. Layanan Permintaan Peliputan Kegiatan Strategis BPOM
8. Layanan Publikasi Kegiatan Strategis BPOM pada Media Sosial Resmi BPOM, dan
9. Layanan Permohonan Wawancara dari Media

Berdasarkan nilai IPP, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama dan Humas sebesar 3,83, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai. Hal ini disebabkan salah satunya karena

survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian IKK5, antara lain:

- a. Memfinalisasikan Rancangan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT;
- b. Mensosialisasikan Sistem Informasi Kerja Sama dan pemuktakhiran data pada aplikasi *Export Consultation Desk* (ECD);
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan BPOM Week di Dubai Expo 2020, Uni Emirat Arab;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan bahan kerja sama;
- f. Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis BPOM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM, terutama yang melibatkan Kepala BPOM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), media sosial official official BPOM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarakan ke media;
- g. Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi early warning system mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM;
- h. Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di BPOM melalui berbagai akun official media social BPOM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.

### C. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

#### SK3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

IKK 6 Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

**IKK 6: Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	87,70	105,67	188.468	188.420	99,97

Realisasi pencapaian dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu sebesar 87,70% dari target 83% atau capaian sebesar 105,67%. Pengukuran tepat waktu berdasarkan waktu baku pada SOP terkait kerja sama dan hubungan masyarakat.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK6, antara lain:

- Melakukan tinjau ulang SOP disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam melakukan pembahasan Bersama, dll.
- Menyusun pedoman kerja sama dan pengembangan aplikasi terkait.

Dalam forum bilateral, telah dilaksanakan penandatanganan MOU BPOM dengan Mitra di luar Negeri, seperti MoU antara BPOM dengan *Ministry of Health Palestina*.

Dalam kaitan kerja sama dalam negeri, rincian dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Capaian Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri 2022**

NO	DOKUMEN KERJA SAMA	IMPLEMENTASI
1	MoU antara BPOM dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia	MoU ditandatangani tanggal 4 Januari 2022
2	PKS antara BPOM dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	MoU ditandatangani tanggal 25 Januari 2022
3	PKS antara BPOM dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	MoU ditandatangani tanggal 22 Februari 2022
4	MoU antara BPOM dengan Pemerintah Provinsi Tarakan	MoU ditandatangani tanggal 24 Maret 2022
5	MOU antara BPOM dengan Universitas Bhayangkara	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022

NO	DOKUMEN KERJA SAMA	IMPLEMENTASI
6	MOU antara BPOM dengan USAHID	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
7	MOU antara BPOM dengan Universitas Brawijaya	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
8	MOU antara BPOM dengan Universitas Andalas	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
9	PKS MOU antara BPOM dengan Balai Sertifikasi Elektronik	MoU ditandatangani tanggal 7 April 2022
10	MOU antara BPOM dengan Universitas Gadjah Mada	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
11	MOU antara BPOM dengan Universitas Padjajaran	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
12	MOU antara BPOM dengan Institut Pertanian Bogor	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
13	MOU antara BPOM dengan idEA	MoU ditandatangani tanggal 27 Mei 2022
14	MOU antara BPOM dengan Universitas Sumatera Utara	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
15	MOU antara BPOM dengan Universitas Hassanuddin	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
16	MOU antara BPOM dengan Universitas Diponegoro	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
17	Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara BPOM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik	MoU ditandatangani tanggal 28 Juni 2022
18	MOU antara BPOM dengan Institut Teknologi Bandung	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
19	MoU antara BPOM dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur	MoU ditandatangani tanggal 26 Juli 2022

NO	DOKUMEN KERJA SAMA	IMPLEMENTASI
20	PKS antara BPOM dengan Diklat Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia	PKS ditandatangani tanggal 4 Juni 2022
21	MoU antara BPOM dengan Pemprov Jawa Timur	MoU ditandatangani tanggal 1 Agustus 2022
22	MOU antara BPOM dengan Universitas Airlangga	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
23	MOU antara BPOM dengan Universitas Indonesia	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
24	PKS antara BPOM dengan SMESCO	PKS ditandatangani tanggal September 2022
25	MOU antara BPOM dengan Universitas Diponegoro	MoU ditandatangani tanggal 14 April 2022
26	PKS antara BPOM dengan Badan Narkotika Nasional	PKS ditandatangani tanggal 17 Oktober 2022
27	PKS antara BPOM dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia	PKS ditandatangani tanggal 19 Oktober 2022
28	MOU antara BPOM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional	MoU ditandatangani tanggal 27 Oktober 2022
29	MOU antara BPOM dengan Palang Merah Indonesia tgl 21 Nov	MoU ditandatangani tanggal 21 November 2022
30	MOU antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia	MoU ditandatangani tanggal 7 November 2022
31	MOU antara BPOM dengan Kwartir Nasional Pramuka	MoU ditandatangani tanggal 25 November 2022

**D. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional**

**SK4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional**

**IKK 7** Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

**IKK 7: Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2	2	100%	705.331	704.948	99,95

Pada tahun 2022, BPOM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Republik Demokratik Timor-Leste dalam bentuk Pelatihan dan Pengujian Sampel *Autoridade Inspecao no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár* (AIFAESA), I.P Timor- Leste dan KSS BPOM untuk Palestina dalam workshop “*Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority*”. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan kontribusi BPOM sebagai regulator di bidang pengawasan obat dan makanan terhadap Program KSS yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (ProPN).

BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi AIFAESA, I.P Timor Leste pada tanggal 19 - 27 September 2022 di Kupang. Sebagai bentuk komitmen BPOM untuk membantu Timor Leste dalam meningkatkan kapasitas di bidang pengawasan pangan (khususnya pengujian pangan), BPOM telah menyelenggarakan program KSS kepada Timor Leste sejak tahun 2018.



Kegiatan KSS Timor Leste diikuti oleh 4 (empat) pengawas pangan dari AIFAESA, I.P dengan narasumber dari PPPOMN, Direktorat Pengawasan, Peredaran Pangan Olahan dan Balai POM di Kupang. Materi pelatihan antara lain cara berlaboratorium yang baik, pengenalan teknik sampling, pengenalan produk dan jenis pengujian Kimia pangan dan mikrobiologi.

Dalam rangka keberlanjutan program KSS Timor Leste di tahun 2023, saat ini Sekretariat Utama cq Biro Kerja Sama dan Humas tengah melakukan upaya pemberian hibah berupa peralatan laboratorium kepada AIFAESA, I.P. atas dukungan Kementerian Luar Negeri dan LDKPI, Kementerian Keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi fasilitas pengujian laboratorium pangan di Timor-Leste dan mendukung peningkatan kapasitas pengawasan pangan di Timor-Leste.

Selain itu, BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara virtual di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 20 – 22 September 2022. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator.



BPOM telah memberikan bantuan teknis kepada Palestina dalam bentuk pelatihan/*capacity building* selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pemberian bantuan teknis yang dilakukan melalui kerangka KSS ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas regulator obat di Palestina dalam memastikan produk yang diedarkan di Palestina merupakan produk yang aman, berkhasiat dan berkualitas baik.

Kegiatan KSS Palestina diikuti oleh 26 (dua puluh enam) peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina dengan materi pelatihan dibidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Pangan Olahan dan Laboratorium.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK7, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM.
- Penyusunan telaah, kajian serta usulan/rekomendasi terkait kerja sama selatan-selatan.

**E. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas**

<b>SK5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas</b>	
<b>IKK 8</b>	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media
<b>IKK 9</b>	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti
<b>IKK 10</b>	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting

**E.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e = \frac{d}{c} \times 100$	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	97,68	97,83	1.765.455	1.764.401	99,94

Realisasi persentase kualitas pemberitaan Badan POM di media pada Tahun 2022 adalah sebesar 97,68 dari target 99,84, sehingga capaian indikator adalah 97,83% dengan kategori “Belum memenuhi ekspektasi” (Kuning). Indikator ini belum tercapai disebabkan karena pada triwulan IV tahun 2022 terjadi peningkatan pemberitaan dengan tonasi negatif sebanyak 779 berita. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan berita tentang BPOM yang bertonasi positif dan netral yang banyak beredar di berbagai media.

Indikator persentase kualitas pemberitaan Badan POM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media online yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tone netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari 36.919 berita tentang BPOM, terdapat 18.608 berita dengan tonasi netral, 17.453 berita dengan tonasi positif, dan 858 berita dengan notasi negatif.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pada Januari, penerbitan siaran pers mengenai vaksin booster yang ditunggu masyarakat. Penerbitan EUA lima vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster telah mendominasi pemberitaan. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Pada bulan ini, topik pemberitaan lain terkait BPOM yaitu penerbitan EUA untuk Obat Molnupiravir dan EUA untuk Vaksin Sinopharm sebagai Dosis Booster.
- b. Pada Februari, pemberitaan didominasi terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Merah Putih sehingga semakin mengukuhkan perkembangan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri. penerbitan PPUK ini juga menjadi daya tawar yang kuat bagi produksi obat dan vaksin dalam negeri untuk bersaing dipasar global.
- c. Pada Maret, pemberitaan didominasi terkait operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor serta pemberitaan terkait penetapan Perpanjangan Batas Kedaluwarsa (*Expired Date/ED*) Vaksin COVID-19.
- d. Penjelasan BPOM terhadap isu yang berkembang di luar negeri seperti penarikan produk Formula Bayi di Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi Cronobacter sakazakii dan Salmonella Newport serta penarikan produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Negara Uni Eropa karena cemaran Salmonella.
- e. Dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika dalam bentuk program Orang Tua Angkat Jamu.
- f. Pada April, pemberitaan didominasi terkait pengawasan takjil dan pasar. Media memberitakan berbagai pengawasan UPT BPOM terhadap pangan untuk berbuka puasa di beragam tempat. UPT juga melakukan pengawasan ke pasar untuk mengawasi pangan selama Ramadan dan jelang Idul fitri.
- g. Pada Mei, pemberitaan didominasi terkait rencana BPOM atas Pelabelan BPA free pada produk AMDK. Hal ini menuai pro-kontra, banyak pihak yang menyatakan penolakan atas rencana revisi kebijakan tersebut selain pihak yang mendukung pelabelan dengan pertimbangan dampak kesehatan.
- h. Pada Juni, pemberitaan tentang rencana pelabelan BPA Free pada AMDK yang memuat upaya BPOM yang terus menegaskan pentingnya pelabelan BPA Free pada AMDK sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat masih mendominasi. Selain itu pemberitaan juga memuat mengenai upaya BPOM menindak tegas sarana produksi tahu berformalin beromset ratusan juta di parung, Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, dan Vaksin Merah Putih.
- i. Pada Juli, pemberitaan terbanyak tentang BPOM RI Tarik Produk Es Krim HaagenDazs Rasa Vanila dan BPOM Beri Izin Paxlovid Jadi Obat Covid-19.

- j. Pada Agustus, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Izinkan Anak Usia 16-18 Tahun Terima Vaksin Booster dan Uji Klinis Vaksin Indovac dan Inavac.
- k. Pada September, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Terbitkan EUA Vaksin Indovac dan Awcora dan Pernyataan BPOM mengenai penarikan mie sedaap di Hong Kong.
- l. Pada triwulan IV 2022, pemberitaan terbanyak tentang isu produk sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indicator IKK8 ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.
- b. BPOM membangun agenda setting yang diorkestrasi dan diimplifikasi oleh Unit kerja dan UPT untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

## E.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e = \frac{d}{c} \times 100$	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	76,67	116,16	360.614	360.368	99,93

Realisasi Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti pada Tahun 2022 adalah sebesar 76,67 dari target 66, sehingga capaian indikator adalah 116,16% dengan kategori “Baik” (Hijau).

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui

pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan indikator “persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%

Pada tahun 2022, telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 120 permohonan, dengan rincian 41 (empat puluh satu) wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber *talkshow*.

Realisasi pelaksanaan wawancara/talkshow telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Permohonan wawancara kepada BPOM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
- b. Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan.
- c. Pada triwulan I, banyak wawancara langsung terkait isu yang berkembang di masyarakat maupun pasca konferensi pers dan ditanggapi BPOM dengan menghadirkan narasumber dari unit teknis baik eselon 1 maupun eselon 2 serta pemenuhan permintaan kunjungan ke laboratorium. Sedangkan pada triwulan kedua ini terkait dengan isu BPA, BPOM menanggapi dengan memenuhi wawancara dari salah satu media, yang kemudian dikutip dan diberitakan oleh media lain.
- d. Pada triwulan II, terdapat beberapa permohonan seputar isu yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan tersebut direspons/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa belum ada perkembangan terbaru mengenai hal yang ditanyakan.
- e. Pada triwulan IV, terdapat lonjakan permohonan wawancara dari media terkait isu produk sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol yang direspons sesuai dengan penjelasan yang diterbitkan BPOM.

Berbagai upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung.

- b. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.
- c. Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan, ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan BPOM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.

**E.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	98,58	103,77	2.358.132	2.317.036	98,26

Target IKK10 sebesar 95 terpenuhi dengan realisasi sebesar 98,58 atau 103,77% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK10 adalah sebesar Rp. 2.358.132.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.317.036.448,- atau 98,26% dengan kategori Baik.

Penyusunan *agenda setting* publikasi tahun 2022 mengacu pada *agenda setting* pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis BPOM tahun 2022. Untuk melaksanakan *agenda setting* tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial BPOM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten *greeting*, konten edukasi, dan konten santai/trivia.

Cara perhitungan indikator persentase publikasi kinerja Badan POM sesuai agenda *setting* adalah dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang diunggah di platform media sosial dengan perencanaan dikalikan 100%. Publikasi adalah pengunggahan materi baik berupa foto, infografis, motiongrafis, videografis ke berbagai akun resmi platform media sosial BPOM (Instagram, fanpage Facebook, Youtube, Twitter). Sedangkan agenda *setting* adalah perencanaan materi publikasi berdasarkan pemetaan isu obat dan makanan yang disusun tahunan, bulanan dan mingguan.

Koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam tim pelaksana media sosial BPOM sangat mendukung tercapainya target indikator tersebut. Selain itu adanya *brainstorming* dengan tim pelaksana media sosial BPOM untuk menyusun kalender konten publikasi setiap bulannya juga menentukan keberhasilan pencapaian target.

**F. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal**

**SK6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal**

**IKK 11** Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas

**IKK 11: Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	87,76	111,80	423.782	418.315	98,71

Sasaran Kegiatan ke-6 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal” diwujudkan dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dicapai oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Penetapan *roadmap* pelaksanaan reformasi birokrasi harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung konsisten penerapan RB di 8 (delapan) area tersebut, diantaranya melalui:

1) Pemeliharaan dan peningkatan *Quality Management System*

**a. Audit Internal QMS ISO 9001:2015**

Audit internal merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam rangka penerapan implementasi sistem mutu. Pada audit internal akan diukur sejauh mana SOP dan instruksi kerja yang dijalankan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan proses. Dalam rangka memperbaiki

kelemahan proses, Biro Kerja Sama dan Humas dituntut selalu melakukan *continuous improvement* dan mengkaji dokumen system mutu/instruksi kerja yang telah diterapkan secara berkala.

Audit internal QMS ISO 9001:2015 tahun 2022 dilakukan oleh auditor internal BPOM pada tanggal 7 s.d 8 Juni 2022 dengan hasil 1 AFI (Saran Perbaikan) dan 2 Aspek Positif, sebagai berikut:

**i. Area for Improvement (AFI)**

Dalam dokumen manajemen risiko, dilakukan monitoring dan aktivitas pengujian risiko dengan menggunakan acuan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPOM pada aktivitas:

- Reviu SOP Penyiapan Kertas Posisi
- Melakukan koordinasi
- Monitoring

Dari hasil pengujian diperoleh sebanyak 94,12% ketidaksesuaian, berdasarkan pedoman seharusnya level kemungkinannya adalah "5", namun dalam risk register adalah "2", sehingga terdapat perbedaan antara hasil pengujian dengan matriks risk register. Untuk itu perlu dilakukan analisis akar masalah penyebabnya dan dibuat rencana perbaikan untuk dapat mereviu dan update manajemen risiko secara berkala.

**ii. Positif Aspek**

1. Lembaga Negara Terpopuler di Media Cetak (2021)
2. Penghargaan untuk Sub Kategori Media Sosial - Bronze Winner dari PR Indonesia Awards (PRIA 2022).

**b. Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015**

Untuk mengetahui apakah Sistem manajemen mutu (QMS) sudah berjalan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan terhadap persyaratan tertentu perlu dilakukan audit oleh pihak eksternal.

Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015 tahun 2022 dilakukan oleh Tim SUCOFINDO tanggal 09 September 2022 dengan menyatakan bahwa tidak diterbitkan temuan baik minor, major maupun observasi. Selain itu,

terdapat 3 (tiga) Aspek Positif. Dengan hasil tersebut, Tim Auditor merekomendasikan kembali terbitnya Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kerja Sama dan Humas.

## c. Internalisasi Reformasi Birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk *RB Talk* sehingga dapat menarik minat para pegawai dan bersifat kekinian dengan topik, kuis, dan reward secara berkala. Pelaksanaan kegiatan internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan budaya organisasi PIKKIR telah dilaksanakan pada:

### 1) Pelaksanaan RB Talk (13 Januari 2022)

Kegiatan dihadiri oleh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara daring untuk membahas:

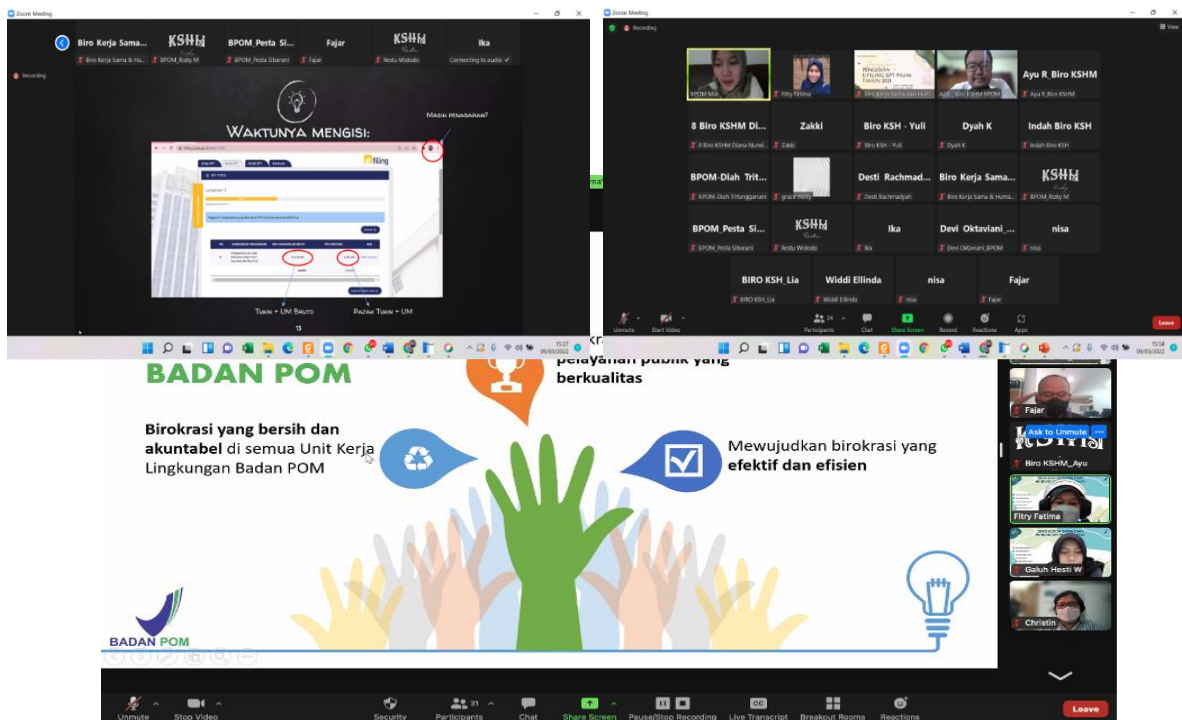
- Plan of Action Agent of Change* Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (KSHM) Tahun 2022;
- Sharing Session* Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembahasan Rencana Kinerja RB Biro KSHM Tahun 2022; dan
- Pengisian survei indeks persepsi RB dan Budaya Organisasi BPOM.



## 2) Pelaksanaan Sharing Session (9 Maret 2022)

Kegiatan dihadiri oleh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara daring untuk melakukan pengisian e-filling pajak tahun 2021.

Kegiatan diawali dengan presentasi dari Aditya Teguh Saputro, S.IP terkait tata cara pengisian e-filling SPT.



Kendala dan hambatan yang dirasakan antara lain kesulitan penjadwalan yang dapat diikuti oleh semua pegawai, karena terdapat kegiatan pimpinan yang penting, prioritas dan segera, terutama Kelompok Subtansi Hubungan Masyarakat yang harus melekat pada pimpinan.

Pagu kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas, yaitu sebesar Rp. 423.782.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 418.315.415,- (98,71%).

### G. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

**SK7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal**

**IKK 12** Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

**IKK 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	78,4	95,61	61.012	61.010	100

Pengembangan kompetensi pegawai sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dengan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya. BPOM secara konsisten terus berkomitmen dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen kegawainan serta secara konsisten mendukung pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPOM guna peningkatan kinerja organisasi.

Target Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas hanya mencapai nilai 78,4 dari target 82. Indeks ini tidak tercapai karena penilaian mensyaratkan setiap JFT untuk sudah melaksanakan Diklat Fungsional. Namun, Struktural yang pindah JFT Pranata Humas melalui penyetaraan tidak memerlukan Diklat Fungsional. Sebagai informasi, hal ini sudah dikomunikasikan dengan Kominfo (selaku Pembina JF Prahum).

Kegiatan yang mendukung IKK 12 antara lain sebagai berikut:

- a) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
- b) Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
- c) Penyelenggaraan *Training of Trainer* Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Tahun 2022;
- d) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: e-Learning Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
- e) Penyelenggaraan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) *Coaching* Pimpinan Tahun 2022.
- f) Penyelenggaraan Team Building Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- g) Seminar *Capacity Building "Public Speaking: Smart and Interesting Speech to Pitch Your Ideas"*

Kegiatan-kegiatan di atas diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Humas. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 61.010.047,- (100%) dari alokasi anggaran Rp. 61.012.000,-









**H. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas**

**SK8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas**

**IKK 13** Indeks pengelolaan data dan informasi

**IKK 13: Indeks pengelolaan data dan informasi**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	2,5	111,11	26.350	26.341	99,97

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2022 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Pemanfaatan *e-mail corporate* BPOM;
- Pemutakhiran data di BPOM *Command Center* (BOC);

c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Kepala Biro Kerja Sama dan Humas.

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 26.341.000,- (99,97%) dari alokasi anggaran yang ditetapkan.

Capaian indikator ini sudah melampaui target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas telah memanfaatkan secara optimal *email corporate* - pom.go.id
- Biro Kerja Sama dan Humas rutin memverifikasi data pada BOC;
- Biro Kerja Sama dan Humas rutin memanfaatkan data pada BOC;

**I. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel**

<b>SK9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel</b>
<b>IKK 14</b> Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

**IKK 14: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90 (efisien)	100 (efisien)	111,11 %	1.284	1.278	99,55

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Biro Kerja Sama dan Humas, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Sebanyak 11 indikator kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- Terdapat 3 (tiga) indikator kegiatan yang belum efisien, yaitu Indeks kepuasan internal, indeks kepuasan media dan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media. Kegiatan tersebut tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (input) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (output).

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2022, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa fokus kepada dukungan visi dan misi BPOM serta penerapan *core value* ASN dan budaya organisasi PIKKIR.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan sasaran, indikator serta target kinerja yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebesar 104,29% dengan kriteria “Baik”.

### B. Saran

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus meningkatkan kinerja serta pelayanan dukungan manajemen BPOM. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan yang SMART dan *applicable*;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi dan digital dalam memberikan pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis teknologi.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
5. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi pegawai secara rutin/berkelanjutan dan mendokumentasikan proses pemberian *reward* dan *punishment* dengan tertib.
6. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.



**BADAN POM**

# **LAPORAN TAHUNAN**

**BIRO KERJA SAMA DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**2 0 2 2**